

# KEBERADAAN PAGUYUBAN PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH PERANTAUAN DALAM MENUNJANG PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN

(Kabus Perisada Hindu Dharma Indonesia Di Semarang)



Direktorat  
Kebudayaan

26

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN MASA KINI  
JAKARTA 1999 / 2000

**KEBERADAAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN  
ETNIS DI DAERAH PERANTAUAN  
DALAM MENUNJANG  
PERSATUAN DAN KESATUAN**

**(Kasus Parisada Hindu Dharma Indonesia di Semarang)**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN MASA KINI  
JAKARTA 1999/2000**

**KEBERADAAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH  
PERANTAUAN DALAM MENUNJANG PERSATUAN DAN KESATUAN  
(Kasus Parisada Hindu Dharma Indonesia di Semarang)**

Tim Penulis : Djoko Mudji Rahardjo  
Wahyuningsih

Penyunting : Herliswany

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Bagian Proyek Pembinaan dan Pengkajian Kebudayaan  
Masa Kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat  
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan.

Jakarta 1999/2000

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. BIMA SAKTI RAYA**

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Pembinaan nilai-nilai budaya Indonesia ditekankan pada usaha menginventarisasi dan memasyarakatkan nilai-nilai budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu program pembinaan kebudayaan diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, memunculkan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan.

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan masa kini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan dalam menghadapi perkembangan jaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan **Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini** Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Di harapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Juli 1999

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I.G.N. Anom', written over a horizontal line.

**I.G.N. Anom**  
NIP. 130353848

## PRAKATA

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi telah menyebabkan interaksi diantara bangsa-bangsa di dunia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kejadian di belahan dunia yang satu segera dapat dirasakan dan dinikmati oleh belahan dunia yang lain. Begitu intensifnya komunikasi antarbangsa dewasa ini telah menyebabkan akulturasi kebudayaan dengan cepat merambah hampir disetiap sektor kehidupan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini berupaya untuk merekam berbagai perubahan kebudayaan. Dengan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi diharapkan dapat dipersiapkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Penerbitan buku hasil perekaman ini merupakan suatu upaya untuk menyebarluaskan informasi kebudayaan mengenai berbagai gejala sosial, serta perkembangan kebudayaan, seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan. Upaya ini dirasa perlu sebab segala tindakan pembangunan tentu akan memunculkan tanggapan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu memahami gejala sosial akibat dari pembangunan perlu dilakukan agar dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

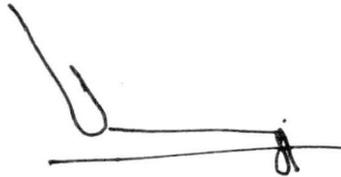
Kepada tim penulisan dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yangtelah membantu sehingga terwujudnya karya ini disampaikan terima kasih.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai, diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca serta memberikan petunjuk bagi kaji selanjutnya.

Jakarta, Juli 1999

**Bagian Proyek Pengkajian dan  
Pembinaan Kebudayaan Masa Kini**

**Pemimpin,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

**Wisnu Subagijo, BA**  
NIP. 130517125

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .....</b>                                  | v       |
| <b>PRAKATA .....</b>  | vii     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | ix      |
| <b>DAFTAR TABEL DAN PETA .....</b>  | xi      |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | xiii    |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>   |         |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Masalah .....  | 3       |
| C. Kerangka Pemikiran .....   | 4       |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 6       |
| E. Ruang Lingkup .....  | 7       |
| F. Metode Penelitian .....  | 7       |
| <b>BAB II. PAGUYUBAN AMONG PARISADA HINDU<br/>DHARMA INDONESIA DI KOTA SEMARANG</b> |         |
| A. Gambaran Umum Kota Semarang .....  | 9       |
| B. Paguyuban Hindu Dharma Indonesia .....   | 20      |
| C. Kegiatan PHDI .....  | 35      |
| <b>BAB III. PERANAN PHDI TERHADAP ANGGOTANYA</b>                                    |         |
| A. Kehidupan Sosial .....   | 41      |
| B. Kehidiiupan Ekonomi .....  | 44      |
| C. Kehidupan Budaya .....   | 47      |
| D. Kehidupan Politik .....  | 50      |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB IV HUBUNGAN PAGUYUBAN PHDI DENGAN LINGKUNGAN SOSIALNYA</b>  |    |
| A. Hubungan PaguyubanPHDI dengan Paguyuban Lainnya .....           | 55 |
| B. Hubungan PaguyubanPHDI dengan Masyarakat Lokal .....            | 58 |
| C. Hubungan Paguyuban PHDI dengan Pemerintah Daerah Setempat ..... | 64 |
| D. Hubungan Paguyuban PHDI dengan Pemda Asal (Provinsi Bali) ..... | 69 |
| <b>BAB V ANALISIS</b>  |    |
| A. Kekuatan Sentripetal (mengikat) .....                           | 74 |
| B. Kekuatan Sentrifugal (memecah belah) .....                      | 78 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b> .....  | 81 |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....                                    | 85 |

## DAFTAR TABEL

| No. | Judul   | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1.  | Ketinggian Tempat di Kotamadya Semarang .....   | 10      |
| 2.  | Banyaknya Hari Hujan, Curah Hujan, Temperatur, dan Kelembaban .....                                     | 11      |
| 3.  | Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kotamadya Semarang, Tahun 1996 .....      | 13      |
| 4.  | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kotamadya Semarang, Tahun 1996 ..... | 14      |
| 5.  | Mata Pencaharian Penduduk di Kotamadya Semarang, Tahun 1996 .....                                       | 15      |
| 6.  | Jumlah Rumah Penduduk dan Jenis Bangunan di Kotamadya Semarang, Tahun 1996 .....                        | 19      |

## DAFTAR PETA

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kota Madya Semarang ..... | 40 |
|---------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul   | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1.  | Bebanten atau sesajen yang disiapkan untuk upacara ...                              | 52      |
| 2.  | Beberapa pengurus PHDI dalam suatu kegiatan upacara di halaman pura .....           | 52      |
| 3.  | Satu di antara kegiatan bidang kesenian dari sekehe Gong Puspa Giri .....           | 53      |
| 4.  | Kegiatan “Makenit” sebagai media pembinaan sosial reliqius bagi generasi muda ..... | 53      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak faktor yang menyebabkan orang, merantau seperti dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Namun demikian, dari beberapa faktor itu dapat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor penarik dan faktor pendorong. Kota-kota besar di Indonesia mempunyai peranan tersendiri dan menentukan baik dalam perkembangan kebudayaan, pembaharuan, perkembangan ekonomi, tempat pendidikan, dan hiburan, serta hal-hal yang berbaur gemerlapan lainnya.

Orang-orang dari desa atau orang dari kota-kota kecil tertarik ke kota besar merupakan hal yang wajar. Hanya saja alasan ketertarikan dari masing-masing individu itu cukup beragam. Alasan yang membuat mereka pindah ke kota antara lain melanjutkan sekolah karena di desa tidak ada kelanjutannya atau mutunya kurang baik, kesempatan mencari kerja atau mengembangkan usaha di kota lebih terbuka, tingkat upah lebih tinggi, hiburan lebih banyak, dan masih banyak sebab lainnya. Daya tarik inilah merupakan salah satu sebab mengapa daerah perkotaan menjadi padat. Kepadatan ini selain dari arus urbanisasi juga pertambahan penduduk secara alami. Dalam sensus tahun 1990, penduduk Indonesia mencapai 180 juta jiwa yang di antaranya sebesar 56 juta (31% atau sepertiga) tinggal di kota.

Sementara itu faktor pendorong orang desa ke kota karena kondisi desa pada umumnya. Faktor-faktor pendorong ini kebalikan dari faktor penarik sehingga penduduk desa pindah ke kota. Kurangnya lapangan kerja, makin menyempitnya kemungkinan berusaha, dan larinya hasil-hasil dari desa untuk pembangunan di kota-kota besar semakin mendorong penduduk meninggalkan desanya. Mereka pergi atau merantau ke kota untuk mendapatkan kesempatan dan kenikmatan hidup yang lebih baik di desanya.

Penduduk yang pindah dari desa ke kota tidak terbatas pada desa tertentu atau ke kota tertentu saja, tetapi juga berasal dari berbagai etnis. Hal ini berlaku hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dengan beraneka ragamnya asal pendatang/perantau, maka penghuni kota pun menjadi heterogen, baik dari segi etnis maupun daerah asal. Jumlah perantau ini dari tahun ke tahun ada kecenderungan meningkat. Seperti misalnya Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduknya selama 10 tahun (1961-1971) dari 503.153 jiwa menjadi 646.590 jiwa atau rata-rata 2,5% per tahun. Kemudian dalam dua periode selanjutnya (1971-1980) rata-rata 5,21% dan (1980-1990) rata-rata 5,21% pertahun (Profil Jawa Tengah, BPS, 1993).

Semakin meningkatnya penduduk perantauan dari berbagai asal daerah atau etnik di perkotaan semakin menambah pula beban kota itu sendiri maupun penghuninya. Padatnya penduduk kota akan meningkatkan pula saling ketergantungan dan bertambah pula sumber salah paham dan konflik (Daldjoeni, 1978). Selain itu juga terjadinya persaingan antarindividu semakin tajam, berkurangnya kebebasan individu, dan pembagian kerja semakin jelas, serta pemanfaatan waktu lebih ketat dan efisien. Hubungan antar individu lebih bersifat fungsional daripada sosial. Kontak sosial di daerah pedesaan bersifat intim (akrab), personal dan total. Sebaliknya pada penduduk perkotaan kontak sosialnya impersonal, segmental dan utilitar (berdasar pada manfaat). Individu memandang individu yang lain bukan sebagai pribadi

apalagi yang utuh, tetapi sebagai pelaku dari peranan tertentu (fungsional).

Secara geografis, areal suatu kota dapat dikatakan lebih luas daripada desa. Seperti telah disebut di atas bahwa kontak sosial lebih bersifat fungsional. Misalnya pada kelompok karyawan perusahaan, meskipun mereka tiap hari bertemu dan melakukan kontak sesuai dengan peran masing-masing, tetapi tempat tinggal mereka menyebar atau berjauhan satu sama lain. Mereka pun jarang bertemu atau saling berkunjung selain di tempat pekerjaan atau pada acara khusus seperti perjamuan undangan pernikahan. Demikian pula di antara teman, sahabat, kerabat, ataupun saudara kendati tinggal satu kota, mereka jarang bertemu selain sibuk oleh urusan masing-masing juga tempat tinggalnya yang menyebar dan berjauhan.

Oleh karena hal-hal seperti tertera di atas, pada masyarakat di kota-kota ada kecenderungan untuk membentuk suatu wadah agar mereka bisa saling bertemu baik di antara teman, sahabat, kerabat baik yang seetnis atau sedaerah asal ataupun sesaudara. Wadah yang dimaksud berupa perkumpulan atau paguyuban.

## **B. Masalah**

Dewasa ini di kota-kota tampak adanya eksklusifisme atau pengelompokan-pengelompokan masyarakat baik yang berdasarkan pada profesi, hobi, seni dan kedaerahan atau etnis. Apalagi penghuni kota itu memang heterogen. Dengan heterogennya penduduk kota ada potensi untuk terjadinya konflik karena adanya sejumlah perbedaan seperti status sosial, organisasi sosial-politik ataupun paguyuban-paguyuban seperti dalam uraian ini. Sudah barang tentu masing-masing kelompok cenderung mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Sikap mementingkan kelompok sendiri ini bila berlebihan akan memancing reaksi pihak lain baik kelompok lain maupun masyarakat sekitarnya. Untuk menghindari perbedaan atau konflik bukan berarti meniadakan perbedaan atau kelompok-

kelompok yang ada di masyarakat. Yang lebih penting bagaimana kelompok-kelompok itu tetap ada dan dapat berdampingan dengan kelompok lain dan atau masyarakat di sekitarnya.

Bagaimana kelompok-kelompok di masyarakat itu atau lebih tepatnya paguyuban itu bisa hidup berdampingan baik antara paguyuban satu dengan lainnya atau dengan masyarakat sekitarnya tanpa menimbulkan gejolak, perlu adanya pembinaan. Untuk melakukan pembinaan perlu adanya bahan. Bahan pembinaan itu bisa didapat dengan menjangkau informasi yang berkaitan dengan paguyuban itu sendiri sebagai terikat. Bagaimana hubungan paguyuban yang bersangkutan dengan paguyuban lainnya? Bagaimana hubungan itu dengan masyarakat lokal/di sekitarnya? Bagaimana hubungan paguyuban dengan Pemda setempat? Dan, bagaimana hubungan paguyuban dengan Pemda/daerah asal?

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kepulauan Nusantara yang merupakan wilayah negara RI diperkirakan dihuni tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mengembangkan kebudayaan dan tradisi masing-masing secara mandiri (Budhisantoso, 1977). Pada awalnya suku-suku bangsa itu menduduki suatu wilayah tertentu. Pada perkembangan selanjutnya tidak sedikit anggotanya yang menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Kecuali yang masih menetap di tempat asalnya, anggota suku bangsa yang bermigrasi itu sengaja atau terpaksa hidup dengan kelompok-kelompok yang berasal dari berbagai suku bangsa lainnya terutama di perkotaan.

Kota-kota di Indonesia berkembang cukup pesat terutama setelah Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1950-an (BN, Marbun SH, 1979). Selama penjajahan Belanda, kota di Indonesia berkembang sangat lambat. Perkembangan yang nyata hanya pada kota-kota pusat perdagangan seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, dan Jakarta (Batavia) sebagai pusat pemerintahan.

Masuknya penjajahan Belanda membawa wajah dan masalah baru kota-kota di Indonesia. Sebagaimana umumnya kehidupan penduduk Indonesia yang bermatapencaharian di bidang pertanian, maka kota sebagai pusat perdagangan pada perkembangannya menjadi pusat kebudayaan baru. Kebudayaan baru ini antara lain karena adanya hubungan antarbudaya dari penghuninya, baik dari suku bangsa-suku bangsa di Indonesia ataupun dari orang asing (luar Indonesia). Dengan demikian, masyarakat yang menghuni kota pun akan berbeda dengan masyarakat yang ada di desa-desa.

Perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kota dan di desa dapat dilihat melalui ciri-cirinya. Dalam ilmu sosiologi dikenal istilah komunitas sebagai lawan mass society. Komunitas diperuntukkan pada pedesaan yang masyarakatnya bersatu dalam pemukiman, mengindentikkan diri antar sesama, kuat dalam tradisi, maupun bekerja sama, dan nilai-nilai serta perhatian akan kebersamaan. Sementara itu, mass society diperuntukkan pada masyarakat kota yang anggotanya saling berpecah dan tidak saling mengenal, lebih terikat kontrak daripada kekeluargaan, hubungan serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen yang mapan (Daldjoni 1978).

Tidak sedikit warga kota yang tinggal di kota baik yang sudah lama atau baru, belum bisa melepaskan pada budaya yang dibawa dari daerah asal seperti di desa dahulu. Kontak sosial di pedesaan bersifat intim (akrab), personal, dan total. Hal ini semakin jarang didapatkan orang yang tinggal di kota. Sementara itu kontak sosial bersifat impersonal. Segmental, dan utilitar atau hanya berdasar azas manfaat. Seseorang kontak dengan orang lain hanya berdasarkan kepentingan. Dengan kondisi-kondisi seperti telah disebutkan di atas, seringkali manusia kota mengalami “kesendirian atau kesepian dalam keramaian”. Agar tidak merasa “sendiri” dan “sepi”, warga kota perlu berhubungan dengan orang lain yang akrab, familiar, atau paling tidak bisa menciptakan suasana seperti di tengah keluarga atau di tempat asal. Untuk menciptakan suasana seperti itu diperlukan sarana yakni perkumpulan.

Perkumpulan yang diharapkan ini biasanya berdasarkan pada kerabat, etnis atau daerah asal. Perkumpulan semacam ini dapat disebut seperti paguyuban.

Paguyuban berasal dari kata “guyub” yang dalam bahasa Jawa berarti “bersama-sama” atau “kumpul”. Dengan demikian paguyuban berarti perkumpulan. Anggota dari paguyuban ini biasanya berangkat dari asal yang sama seperti etnis atau daerah. Demikian pula paguyuban yang ada di kota Semarang ini anggotanya ada yang berdasarkan pada etnis atau daerah yang sama. Paguyuban kedaerahan adalah perkumpulan yang anggotanya berasal dari daerah yang sama. Daerah di sini lebih bersifat wilayah administratif bisa berarti desa, kecamatan, kabupaten atau kota kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya, paguyuban etnis adalah perkumpulan yang anggotanya didasarkan pada kesamaan suku bangsa sehingga warna kultural pada paguyuban ini tampak kental.

Pada kenyataan kadang sulit menentukan jenis kesukubangsaan seseorang, tetapi didefinisikan suku bangsa dianggap begitu jelas oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Biasanya kesukubangsaan seseorang ini bisa dirunut atas dasar keturunan. Seringkali definisi etnis berhimpitan dengan definisi kedaerahan sehingga tidak mudah untuk membedakan apakah suatu paguyuban merupakan paguyuban etnis atau paguyuban kedaerahan. Untuk selanjutnya, istilah paguyuban etnis dan kedaerahan disebut paguyuban saja (Sri Ahimsa Putra, H., 1998).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keberadaan paguyuban di kota-kota besar seperti di Semarang. Dengan keberadaannya paguyuban-paguyuban itu dapat diketahui hubungan-hubungan antarpaguyuban, dengan masyarakat sekitar dan dengan Pemda setempat dan atau Pemda asal anggota. Selain itu, dapat pula diketahui berbagai kendala yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari berbagai aspek yang

menjadi kendala tersebut akan dicarikan jalan keluar permasalahan sebagaimana mestinya.

Keseluruhan data yang didapat diharapkan akan berguna sebagai bahan informasi kebudayaan dan bahan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk mempertahankan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian mengenai paguyuban ini akan ditekankan kepada masalah integrasi sosial antarpaguyuban, antara paguyuban dengan masyarakat sekitar di kota-kota besar di Jawa Tengah. Kota besar diasumsikan warganya banyak berasal dari pendatang/perantau dari berbagai etnis dan daerah. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor apa yang menjadi indikator munculnya masalah disintegrasi. Adapun paguyuban yang akan menjadi pusat kajian adalah yang paling menonjol atau dikenal masyarakat dan jumlah anggotanya terbanyak.

Untuk memperoleh data yang akurat dan sempurna, maka metode penelitian yang dirasa tepat adalah studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus akan dapat dikaji secara mendalam berbagai data yang tersurat dan terwujud maupun yang belum terungkap dalam integrasi sosial, yang oleh para pelakunya sendiri sulit untuk dijelaskan, tetapi dapat ditemukan dan diuraikan melalui penelitian ini.

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan terlibat. Studi kepustakaan merupakan studi pendahuluan untuk mengumpulkan data sekunder berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara akan dilaksanakan kepada beberapa informan yang mengetahui paguyuban yang bersangkutan beserta kontak-kontaknya terhadap pihak luar.

Metode pengamatan dilakukan dengan harapan unsur-unsur kebudayaan tertentu yang tersembunyi dan tidak dapat diungkap dalam komunikasi tatap muka dapat terjaring, dan juga untuk mengetahui situasi (konteks ruang dan waktu) dimana paguyuban itu berada. Dalam pengamatan ini, penelitian akan mencatat selengkap mungkin berbagai kenyataan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Adapun susunan dalam tulisan ini sebagai berikut. Bab I. Pendahuluan, mengemukakan beberapa hal tentang tata cara perekaman tertulis ini dilakukan. Latar Belakang, Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Ruang Lingkup, dan Metode Penelitian.

Bab II. Paguyuban PHDI di Kota Semarang menjelaskan tentang lokasi dan lingkungan Kota Semarang, lahirnya paguyuban PHDI dan perkembangannya, struktur organisasi paguyuban PHDI, dan kegiatan-kegiatan paguyuban PHDI

Bab III. Fungsi paguyuban PHDI bagi anggota yang menguraikan tentang pandangan anggota terhadap paguyuban, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, dan kehidupan politik.

Bab IV. Hubungan paguyuban dengan lingkungan sosialnya yang menerangkan bagaimana hubungan paguyuban PHDI dengan paguyuban lainnya, hubungan paguyuban PHDI dengan masyarakat sekitar, hubungan paguyuban PHDI dengan Pemda setempat, dan hubungan paguyuban PHDI dengan Pemda asal.

Bab V. "Analisis" termasuk pandangan anggota terhadap fungsi paguyuban yang memilah antar kekuatan sentripetal (mengikat) dan kekuatan sentrifugal (memecah belah). Dan diakhiri dengan Bab VI. Kesimpulan, Daftar Pustaka, dan Daftar Informan.

## **BAB II**

### **PAGUYUBAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA DI KOTA SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang berstatus Kotamadya, dan menjadi ibukota provinsi Jawa Tengah. Selain menjadi ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang berfungsi sebagai kota industri, kota dagang dan kota pelabuhan yang terbesar di Jawa Tengah.

##### **1. Lokasi dan Lingkungan Alam**

Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah, pada tepi teluk yang terbuka menghadap ke arah barat laut. Letak kotamadya Semarang tersebut hampir berada di tengah bentangan panjang kepulauan Indonesia dari arah barat ke timur. Letak Astronomis kota ini adalah antara garis  $6^{\circ}.50'$ - $7^{\circ}.10'$  lintang selatan dan garis  $109^{\circ}.35'$ - $110^{\circ}.50'$  bujur timur. Kotamadya Semarang termasuk beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Temperatur udara rata-rata  $27,6^{\circ}$  C. dengan temperatur terendah berkisar  $23,4^{\circ}$  C. dan tertinggi berkisar  $30,8^{\circ}$  C. serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 77%.

Secara administratif kotamadya Semarang dibatasi sebelah barat kabupaten Kendal, sebelah timur kabupaten Demak, sebelah selatan dibatasi kabupaten Semarang dan sebelah

utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 kilometer. Luas wilayah kotamadya Semarang 373,63 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Sebagian besar penggunaan tanahnya untuk bangunan dan pekarangan, yaitu 33,65% dan 25,74% untuk tegalan, kebun atau ladang, kemudian tanah sawah sebesar 4,3% sedangkan sisanya yaitu sekitar 36,31% dimanfaatkan untuk tambak, perkebunan juga berupa hutan dan lain-lain.

Dalam perkembangan, kotamadya Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk kota Semarang sebagai kota yang mempunyai ciri khas, yaitu kota pantai dan kota pegunungan. Dilihat dari topografinya, wilayah kotamadya Semarang terdiri dari dua macam unit geoformologi yaitu dataran aluvial pantai dan daerah perbukitan candi. Dataran aluvial pantai merupakan bagian utara kotamadya Semarang dengan relief yang datar dan sedikit miring ke arah laut. Ketinggian daerah ini antara 0.5-3.5 meter di atas permukaan laut, dan di dataran pantai inilah kota Semarang tumbuh dan berkembang menjadi kota pelabuhan.

**Tabel 1. Ketinggian Tempat di Kotamadya Semarang**

| No. | Bagian Wilayah       | Ketinggian (0,00 m) |
|-----|----------------------|---------------------|
| 1.  | Daerah Pantai        | 0.75                |
| 2.  | Pusat keramaian kota | 2.45                |
| 3.  | Simpang Lima         | 3.49                |
| 4.  | Candi Baru           | 90.56               |
| 5.  | Jatingaleh           | 136.00              |
| 6.  | Gombel               | 270.00              |
| 7.  | Gunung Pati          |                     |
|     | - sebelah barat      | 259.00              |
|     | - sebelah timur      | 348.00              |
| 8.  | Mijen (bagian atas)  | 253.00              |

Sumber : Kotamadya Semarang Dalam Angka

Jaringan lalu lintas jalan di dataran aluvial atau daerah pantai dan dataran rendah ini lebih rapat dibanding daerah perbukitan. Mudah-mudahan transportasi tersebut menyebabkan penduduk lebih senang bertempat tinggal di wilayah ini sehingga kerapatan penduduk di daerah pantai lebih tinggi dibandingkan daerah perbukitan. Di wilayah daerah pantai dan dataran rendah atau “kota bawah” mempunyai struktur endapan sampai yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan tanah liat. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan lebih banyak untuk jalan, pemukiman/perumahan, kawasan industri, bangunan perkantoran, persawahan, tambak dan empang. Tidak mengherankan bila “kota bawah” merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, transportasi dan perikanan.

**Tabel 2. Banyaknya Hari Hujan, Curah Hujan, Rata-rata Temperatur Dan Kelembaban Udara di Kotamadya Semarang tahun 1996**

| No  | Bulan     | Hari Hujan (hr) | Curah Hujan (cr) | Rata-rata Temperatur (°C) | Kelembaban Udara (%) |
|-----|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.  | Januari   | 19              | 225              | 26.2                      | 2                    |
| 2.  | Februari  | 22              | 400              | 25.8                      | 76                   |
| 3.  | Maret     | 20              | 114              | 27.2                      | 7385                 |
| 4.  | April     | 14              | 254              | 27.9                      | 87                   |
| 5.  | Mei       | 8               | 104              | 28.2                      | 8                    |
| 6.  | Juni      | 5               | 11               | 28.2                      | 72                   |
| 7.  | Juli      | 9               | 95               | 27.5                      | 74                   |
| 8.  | Agustus   | 6               | 141.5            | 30.2                      | 70                   |
| 9.  | September | 5               | 66.1             | 28                        | 69                   |
| 10. | Oktober   | 18              | 328.3            | 28                        | 77                   |
| 11. | Nopember  | 22              | 300.8            | 27.4                      | 78                   |
| 12. | Desember  | 25              | 393              | 26.6                      | 82                   |

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi Semarang

Di bagian selatan kotamadya Semarang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 90-270 meter di atas permukaan laut. Struktur geofomologi daerah perbukitan ini terdiri atas batuan beku dari struktur lipatan, patahan dan plateau. Bukit-bukit candi pada umumnya membujur arah barat ke timur dengan lembah-lembah diantaranya yang terdapat sungai-sungai sebagai akibat curah hujan yang cukup besar. Daerah perbukitan atau 'kota atas' ini wilayahnya dimanfaatkan untuk kebun, tegalan, hutan negara, padang rumput dan pemukiman penduduk.

## 2. Kependudukan

Menurut data yang tercatat pada kantor statistik kotamadya Semarang, jumlah penduduk kotamadya Semarang pada tahun 1996 adalah 1.251.845 jiwa, terdiri atas 622.014 jiwa laki-laki dan 629.831 jiwa perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan perbedaannya tidak begitu besar. Selain itu ditinjau dari kelompok usia tersebut komposisi yang cukup baik bila dikaitkan dengan sumber daya manusia, terutama usia produktif penduduk, seperti yang terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pola usia penduduk kotamadya Semarang berada pada kelompok menengah, terlihat pada presentasi usia 0-14 sebesar 28.62%, kelompok usia 15-64 tahun sebesar 68.88% dan kelompok usia 65 tahun keatas sebesar 2.5%. dengan demikian, sumber daya manusia khususnya penduduk dalam usia kerja produktif cukup besar, yaitu lebih dari setengah jumlah keseluruhan.

**Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kotamadya Semarang Tahun 1996**

| Kelompok Usia (tahun) | Penduduk Laki-laki (jiwa) | Penduduk Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 0 - 4                 | 57.866                    | 57.386                    | 115.272       |
| 5 - 9                 | 60.216                    | 59.924                    | 120.140       |
| 10 - 14               | 61.637                    | 61.205                    | 122.842       |
| 15 - 19               | 60.635                    | 60.205                    | 120.570       |
| 20 - 24               | 59.806                    | 61.098                    | 120.904       |
| 25 - 29               | 57.077                    | 58.194                    | 115.271       |
| 30 - 34               | 52.679                    | 52.654                    | 105.333       |
| 35 - 39               | 46.415                    | 47.328                    | 93.743        |
| 40 - 44               | 39.613                    | 40.441                    | 80.054        |
| 45 - 49               | 34.345                    | 35.788                    | 70.133        |
| 50 - 54               | 31.015                    | 31.998                    | 63.013        |
| 55 - 59               | 25.302                    | 25.660                    | 50.962        |
| 60 - 64               | 20.569                    | 21.785                    | 42.354        |
| 65                    | 15.086                    | 16.165                    | 31.254        |
| Jumlah                | 622.014                   | 629.831                   | 1.251.845     |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Semarang

Menurut catatan Kantor Statistik kotamadya Semarang, jumlah penduduk kotamadya Semarang pada tahun 1992 adalah 1.171.578 jiwa, kemudian tahun 1993 menjadi 1.177.562 jiwa dan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1994 tercatat sebanyak 1.206.363 jiwa. Pada tahun 1995 jumlah penduduk naik lagi menjadi 1.232.931 jiwa, sedangkan tahun 1996 menjadi 1.251.845 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 6.592 jiwa per km<sup>2</sup> .

Pertumbuhan penduduk di kotamadya Semarang selain didukung oleh besarnya kelahiran, juga diperbesar oleh penambahan penduduk pendatang atau migrasi. Menurut catatan kantor sensus dan statistik kotamadya Semarang,

penduduk kotamadya Semarang setiap tahun rata-rata bertambah 2,16% dan dari jumlah tersebut 0,9% pertambahan penduduk karena migrasi.

Kepadatan penduduk yang tertinggi di kecamatan Semarang Tengah dengan wilayah seluas 5,14 km<sup>2</sup> adalah 16.013 jiwa/km<sup>2</sup>. Selanjutnya kecamatan Semarang Selatan mempunyai kepadatan penduduk sebesar 13.356 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil adalah kecamatan Mijen yaitu 590 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci kepadatan penduduk tiap kecamatan di kotamadya Semarang dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kotamadya Semarang Tahun 1996**

| No  | Kecamatan        | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Tiap Km2 |
|-----|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1.  | Mijen            | 57.55              | 33.926                 | 590                |
| 2.  | Gunung Pati      | 52.63              | 50.271                 | 955                |
| 3.  | Semarang Selatan | 5.92               | 79.048                 | 13.353             |
| 4.  | Banyumanik       | 27.73              | 91.424                 | 3.297              |
| 5.  | Gajah Mungkur    | 10.78              | 54.088                 | 5.017              |
| 6.  | Genuk            | 27.39              | 52.646                 | 1.922              |
| 7.  | Pedurungan       | 20.72              | 112.410                | 5.425              |
| 8.  | Gayam Sari       | 5.26               | 60.316                 | 11.467             |
| 9.  | Semarang Timur   | 7.12               | 91.628                 | 12.869             |
| 10. | Candi Sari       | 6.80               | 76.308                 | 11.222             |
| 11. | Tembalang        | 44.20              | 83.431                 | 1.888              |
| 12. | Semarang Utara   | 10.97              | 130.489                | 11.895             |
| 13. | Semarang Tengah  | 5.14               | 82.308                 | 16.013             |
| 14. | Semarang Barat   | 19.96              | 138.851                | 6.956              |
| 15. | Ngaliyan         | 39.97              | 73.485                 | 1.838              |
| 16. | Tugu             | 29.38              | 22.299                 | 759                |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Semarang

Mata pencaharian penduduk kotamadya Semarang sangat bervariasi jenisnya, yaitu mulai dari petani, nelayan, pengusaha, buruh, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan lain-lain. Secara rinci, mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk di Kotamadya Semarang Tahun 1996**

| No. | Jenis Mata Pencaharian   | Jumlah  | Keterangan   |
|-----|--------------------------|---------|--|
| 1.  | Petani Sendiri           | 28.749  | Petani terbesar di kecamatan Gunungpati yaitu 22.001 |
| 2.  | Buruh Tani               | 32.771  |  |
| 3.  | Nelayan                  | 2.852   |  |
| 4.  | Pengusaha                | 15.442  |  |
| 5.  | Buruh Industri           | 175.361 |  |
| 6.  | Buruh Bangunan           | 105.080 |  |
| 7.  | Pedagang                 | 73.505  |  |
| 8.  | Angkutan                 | 26.806  |  |
| 9.  | Pegawai Negeri dan ABRI  | 90.270  |  |
| 10. | Pensiunan                | 27.804  |  |
| 11. | Bidang Jasa dan lai-lain | 243.536 |  |
|     | Jumlah                   | 822.176 |  |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Semarang

Dari jenis mata pencaharian penduduk di kotamadya Semarang, nelayan didominasi penduduk wilayah kecamatan Semarang Utara yaitu 2.852, demikian pula mata pencaharian sebagai pengusaha dan buruh industri. Mata pencaharian sebagai pedagang didominasi penduduk kecamatan Semarang Timur, yaitu 22,6% dari jumlah pedagang di kotamadya Semarang, sedangkan pegawai negeri dan ABRI angka terbesar adalah penduduk di kecamatan Banyumanik yaitu 14,7%, diikuti kecamatan Gajah Mungkur dan kecamatan Pedurungan masing-masing 11,6% dan 11,4% dari jumlah seluruh PNS dan ABRI di kotamadya Semarang.

Menurut agama yang dianut, sebagian besar penduduk kotamadya Semarang memeluk agama Islam yaitu sebanyak 83,67% atau 1.047.416 jiwa. Penduduk yang beragama Kristen Katolik sebanyak 93.749 jiwa atau 7,48%, beragama Budha sebanyak 21.808 jiwa atau 1,74% dan yang memeluk agama Hindu berjumlah 7.510 jiwa atau 0,62%. Kehidupan beragama juga ditandai oleh adanya berbagai bangunan tempat beribadat yang dibangun oleh masyarakat maupun oleh bantuan pemerintah daerah.

Dari data yang tercatat di kantor statistik dan monografi kotamadya Semarang, pada tahun 1996 terdapat bangunan mesjid sebanyak 764 buah, langgar atau mushalla sebanyak 1.571 buah. Gereja sebanyak 247 buah dan bangunan beribadat lainnya seperti kuil, pura dan lain-lain berjumlah 19 buah tersebar di wilayah kotamadya Semarang, terutama kecamatan Semarang Tengah yang berjumlah 6 buah.

### 3. Pola Pemukiman

Kota Semarang semula berada di sekitar daerah Bubakan di tepi kali Semarang, dan berfungsi sebagai kota pelabuhan. Daerah Bubakan berasal dari kata “Bubak” yang berarti, membuka sebidang tanah untuk dijadikan tempat pemukiman. Pembukaan tanah ini dilakukan oleh Ki Ageng Pandan Arang I yang diangkat oleh Sultan Demak sebagai bupati di daerah itu pada sekitar tahun 1476 M. daerah kabupaten itu semakin lama semakin banyak penghuninya, sehingga daerah pemukiman meluas di daerah-daerah sekitarnya.

Mengenai asal usul nama Semarang terdapat beberapa pendapat, antara lain nama Semarang berasal dari nama yang diberikan oleh Syech Wali Lanang untuk menamakan tempat kediaman Ki Agung Pandan Arang I yang diramalkan bahwa kelak tempat itu akan menjadi “kuta pesirah” atau ibukota. Pendapat lain menyatakan bahwa kata Semarang berawal dari kata “asem-arang”, karena di daerah itu banyak ditanam pohon asem yang jaraknya satu sama lain agak berjauhan (bahasa Jawa arang-arang). Kalau kita lihat, saat ini jalan-jalan di kota

Semarang masih terdapat pohon asam yang sengaja ditanam sebagai ciri khas kotamadya Semarang.

Menurut perhitungan, bersamaan dengan pengangkatan Ki Ageng Pandan Arang II sebagai bupati Semarang, maka tanggal 2 Mei 1547 ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Waktu itu kota Semarang sudah mencerminkan suatu kota dengan planologi secara tradisional dengan kabupaten sebagai pusat kota, dan telah dibentuk pola pemukiman “daerah dalam”. Selain daerah dalam, terbentuk “kota Benteng” sebagai tempat pemukiman orang Belanda, dan dalam perkembangan selanjutnya kota Benteng ini menjadi pola dasar atau asal mula pembangunan kota yang sebenarnya. Kota Semarang ini sebagai suatu pusat pemerintahan memiliki jalan yang teratur dan bangunan yang memadai seperti antara lain gereja Belanda, sekolah Marine, gedung keuangan, kuburan Kristen, rumah sakit, gedung Angkatan Darat dan lain-lain.

Pada akhir abad 17 terdapat beberapa kelompok pemukiman berdasarkan etnik yang tersebar di sekitar sungai Semarang, antara lain pemukiman orang Cina di daerah Pekojan, perkampungan orang Melayu Darat di daerah pantai dan perkampungan orang Jawa di sebelah barat dan timur sungai Semarang. Bekaitan dengan mata pencahariannya, orang Cina bermukim dekat pasar sebagai pedagang, orang Melayu sebagai nelayan berdiam di daerah pantai dan orang Jawa berkelompok di sekitar lahan pertanian, sebagai petani.

Perluasan kota Semarang tampak pesat sejak Belanda menguasai Semarang, dengan timbulnya sejumlah perkampungan baru, diantaranya kampung Bugis yang kini menjadi stasiun Tawang. Perkembangan selanjutnya kota Semarang telah meluas secara menyeluruh, pemukiman penduduknya tidak lagi berkelompok menurut etnik dan bangsa, melainkan telah memecah dan bercampur. Masyarakat Jawa mendiami pemukiman dengan pola perkampungan yang teratur, orang-orang Belanda mulai membangun villa-villa dan orang Cina mulai meluaskan tempat tinggalnya di sekitar Pecinaan. Selain itu pada tahun 1914 mulai didirikan pemukiman baru di bukit

Candi yang disebut Candi Baru atau Kota Atas untuk memberikan pemukiman yang selbih sehat bagi penduduk kota. Dalam abad 20, pemukiman di daerah perbukitan Candi Baru atau Kota Atas ini semakin berkembang menjadi daerah tempat tinggal, meskipun Kota Bawah masih tetap disenangi.

Bangunan rumah penduduk dari dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, yaitu umumnya berupa rumah atau bangunan tapak tanah. Perubahan dilakukan untuk perbaikan atau perluasan bangunan, demikian pula bahan bangunan yang digunakan. Beberapa rumah yang dulu masih sederhana sekarang menjadi rumah dan bangunan permanen, yaitu berdinding tembok, berlantai semen, ubin ataupun keramik. Bahkan sebagian diantaranya merupakan bangunan bertingkat. Yang paling banyak mengalami perubahan adalah tempat-tempat dan bangunan untuk kegiatan umum misalnya pusat perdagangan, perkantoran dan perindustrian.

Bangunan rumah yang terletak di tepi jalan seluruhnya menghadap ke jalan, sedangkan yang berada agak jauh dari jalan selalu menghadap ke gang. Pada umumnya gang-gang di kampung lebarnya tidak sama, berliku-liku dan sebagian belum mempunyai selokan pembuangan air. Kondisi yang demikian menyebabkan tata letak bangunan rumah di kampung tidak beraturan. Sementara itu yang agak jauh dari jalan kebanyakan masih semi permanen yaitu rumah setengah tembok atau berdinding papan dan berlantai semen. Pada perkampungan yang pada penduduknya rumah-rumah penduduk bergandengan dengan rumah di sebelah kiri dan kanannya sehingga jarak antar rumah hampir tidak ada. Bangunan rumah di tepi jalan masih dapat dibedakan antara rumah satu dengan lainnya. Ukuran bangunan rumah juga tidak sama, sebagian berukuran sampai ratusan meter persegi, dan sebagian lainnya berukuran relatif kecil.

Rumah yang memiliki pagar dan perkarangan atau halaman cukup luas sebagian besar terdapat di wilayah Semarang Selatan misalnya Candi Baru, Gajah Mungkur dan lain-lain.

Selain itu penduduk yang tinggal di pemukiman ini tergolong orang mampu, terutama bila ditinjau dari bangunan rumahnya yang umumnya bagus-bagus dengan arsitektur meniru gaya Eropa. Secara rinci banyaknya rumah penduduk dan jenis bangunannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. Jumlah Rumah Penduduk dan Jenis Bangunan di Kotamadya Semarang Tahun 1996**

| No. | Jenis Bangunan              | Jumlah  | Keterangan |
|-----|-----------------------------|---------|------------|
| 1.  | Gedung (permanen)           | 163.343 |            |
| 2.  | Sebagian gedung             | 53.741  |            |
| 3.  | Dari papan/kayu             | 29.779  |            |
| 4.  | Dari bambu dan lain-lainnya | 2.670   |            |
|     | Jumlah                      | 249.533 |            |

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Semarang

Satu diantara pendukung potensi kotamadya Semarang adalah sarana jalan, baik jalan raya ataupun jalan kecil. Panjang jalan di kotamadya Semarang seluruhnya sepanjang 1.012.978 Km, terdiri atas jalan aspal 967.027 Km, jenis permukaan jalan kerikil 10.315 Km, Ditinjau dari kondisi jalan, maka jalan yang baik sepanjang 760.150 Km, kondisi sedang sepanjang 206.023 Km, kondisi rusak sepanjang 30.242 Km, dan yang tergolong rusak berat sepanjang 16.563 km. (Kotamadya Semarang Dalam Angka, Tahun 1996).

Di bidang perdagangan, kotamadya Semarang memegang peranan penting tertama dalam bidang pendistribusian barang-barang dari luar negeri, karena kota ini merupakan pintu gerbang masuknya barang-barang dari luar negeri ke Jawa Tengah. Kondisi perairan pelabuhan yang tidak begitu dalam menyebabkan kapal-kapal besar tidak dapat masuk ke perairan pelabuhan sehingga untuk mengangkut barang dari kapal ke pelabuhan menggunakan kapal-kapal tongkang. Sebagai

proses perdagangan, kotamadya Semarang mempunyai beberapa jumlah pasar dan pusat pertokoan misalnya pasar Johar, pasar Pandanaran, pasar Candi dan lain-lain.

Selain menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, kota Semarang termasuk satu di antara kota industri di pulau Jawa. Jumlah industri di kota ini makin lama semakin bertambah, dan sebagian besar berada di wilayah Kota Bawah, yaitu di tepi-tepi jalan besar daerah pantai yang mudah dicapai kendaraan bermotor. Sebagai pusat perdagangan, Semarang menjadi daerah lintas antar Jakarta-Surabaya, dan daerah lintas ke selatan yaitu Salatiga, Surakarta, Magelang, Yogyakarta dan lain-lain.

## **B. Paguyuban Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Perkembangannya**

Sejak jaman kolonial, kota Semarang telah dihuni oleh berbagai suku bangsa maupun bangsa asing dari luar Nusantara. Kecuali bangsa Belanda yang ingin menanamkan kekuasaannya, kedatangan bangsa asing ke Semarang didorong oleh berbagai macam kepentingan terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pada waktu itu sudah ada pengelompokan pemukiman atau tempat tinggal berdasarkan etnik yang berkaitan erat dengan mata pencaharian penduduknya. Di antara kelompok itu adalah pemukiman orang Cina sekitar pasar di daerah Pecinaan, perkampungan orang Melayu di daerah pantai, perkampungan orang Arab di Pekojan, perkampungan orang Jawa di Kanjengan.

Perkembangan selanjutnya, penduduk kota Semarang semakin heterogen, hampir seluruh suku bangsa di Indonesia juga beberapa bangsa asing ada di kota ini. Seiring dengan perjalanan sejarah, timbul organisasi-organisasi politik maupun kegiatan sosial. Pada tahun 1955 di kota Semarang terdapat beberapa organisasi yang dapat dikelompokkan dalam lima organisasi besar, yaitu organisasi wanita, organisasi pemuda, organisasi massa, organisasi buruh dan organisasi partai politik.

Organisasi wanita antara lain Perwani, Wanita Khatolik, Wanita Demokrat, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Kaum Ibu Semarang, Persatuan Jururawat dan lain-lain. Organisasi wanita ini ada yang bertujuan politik, ada yang didasari profesi dan adapula karena kedudukan dan pekerjaan suami. Demikian pula organisasi pemuda pada waktu itu ada yang bergerak dalam kegiatan politik, organisasi kepemudaan yang didasari oleh keagamaan dan profesinya sebagai pelajar. Organisasi tersebut antara lain Pemuda Demokrat, Persatuan Pemuda Islam Indonesia, Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, GP Ansor, Perkumpulan Pemuda Kristen Tionghoa dan lain-lain.

Terbentuknya kelompok sosial disamping berdasarkan kepentingan bersama, juga disebabkan oleh faktor-faktor lain misalnya kesukuan, golongan atau kelas, agama/kepercayaan, kebudayaan dan sebagainya. Kebersamaan tidak hanya disebabkan oleh homogenitas saja, namun kompleksitas faktor-faktor ini menyebabkan kehidupan bersama dapat tercipta dan terjalin dengan baik.

Menurut hasil data ulang Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang, organisasi kemasyarakatan yang berbentuk paguyuban terdaftar sekitar 36 buah. Paguyuban ini ada yang didasari ikatan kekerabatan, suku bangsa, kedaerahan, agama, kebudayaan dan lain-lain. Paguyuban didasari ikatan kekerabatan misalnya Himpunan Kerabat Mangkunegaraan Suryasumirat cabang Semarang, Paguyuban Pensiunan Atmodirono, dan sebagainya. Paguyuban didasari kedaerahan antara lain Paguyuban Keluarga Besar Purworejo, Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes, Ikatan Keluarga Wonogiri dan lain-lain. Paguyuban didasari suku bangsa adalah "Mbuah Page" Persatuan Masyarakat Karo, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Perwama (Persatuan Wanita Maluku), Imapti (Ikatan Mahasiswa Pelajar Timor Timur), Ikatan Keluarga Toraja dan sebagainya. Paguyuban didasari kebudayaan antara lain paguyuban kesenian dan yang banyak adalah paguyuban silat dan beladiri misalnya Lembaga Seni Beladiri Garuda Putih, Tapak Suci Putra Muhammadiyah,

Persilatan Raga Jati cabang kotamadya Semarang dan lain-lain. Selanjutnya paguyuban didasari agama antara lain Ikatan Remaja Mesjid Baiturrahman (IKAMABA), Ikatan Remaja Mesjid Nurul Huda (IRMANUHA), Paguyuban Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan lain-lain.

#### 1. Sejarah Lahirnya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

Mayoritas masyarakat kotamadya Semarang adalah suku bangsa Jawa. Sementara itu kelompok masyarakat dari suku-suku bangsa pendatang mengakibatkan munculnya bermacam-macam kelompok sosial di dalam kehidupan kemasyarakatan, yaitu terkoordinir dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya perkumpulan atau ikatan yang dipimpin oleh seorang ketua ikatan. Pada dasarnya keberadaan perkumpulan atau organisasi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan peranan kota Semarang sebagai ibukota provinsi, pusat pemerintahan juga peranan perguruan tinggi di kota ini.

Satu diantara perkumpulan yang berdasarkan etnis adalah IKIB yaitu singkatan dari Ikatan Keluarga Indonesia Bali. Perkumpulan ini anggotanya terdiri atas orang-orang Bali yang datang dan menetap di Semarang, baik untuk bekerja menuntut ilmu, wiraswasta atau keperluan lainnya. Orang-orang Bali yang umumnya beragama Hindhu ini sering berkumpul-kumpul, terutana dalam kegiatan dan upacara keagamaan. Menurut keterangan beberapa informan, perkumpulan tersebut mulai aktif pada tahun 1970. Kegiatan perkumpulan ini selain untuk menjalin kebersamaan dan kekeluargaan antar warga bali yang ada di kota Semarang, juga gotong-royong mengumpulkan sumbangan atau dana untuk keperluan keagamaan dan sarana ibadah.

Selanjutnya kedatangan orang Bali ke kota Semarang semakin banyak, dan anggota perkumpulan IKIB juga makin bertambah. Karena semakin berkembang dan kegiatan pokok perkumpulan ini lebih mengutamakan ke bidang keagamaan, maka pada tahun 1972, IKIB diubah namanya menjadi PHDI

yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia kotamadya Semarang. Perubahan nama PHDI ini menitikberatkan kepada dasar paguyuban tersebut yaitu agama Hindhu. Berkaitan dengan itu keanggotaan paguyuban ini bukan didasari oleh etnis (Bali) melainkan agama, sehingga siapa saja yang beragama Hindhu dan mengerti agama Hindhu diterima menjadi anggota paguyuban ini. Menurut informasi PHDI kotamadya Semarang telah menampung sekitar 25 kepala keluarga (KK) dari luar etnis Bali yaitu suku bangsa Jawa. Namun demikian, dominasi etnis Bali tetap terlihat dengan jelas dalam paguyuban ini, baik pengurus maupun anggotanya sebagian besar orang Bali.

PHDI kotamadya Semarang merupakan wilayah organisasi di bawah PHDI tingkat I atau provinsi Jawa Tengah, dan berpusat di Denpasar provinsi Bali. Lembaga dengan nama Parisada Hindu Dharma sendiri didirikan pada tanggal 25 Februari 1959 dan berkedudukan di Denpasar Bali. Untuk tingkat kotamadya Semarang, didirikan oleh Letnan Kolonel Ketut Sulem, Made Pade SH, Ir, I Ketut Wane dan ibu Sutjipto. Sampai saat penelitian ini dilakukan (1998), yang terdaftar sebagai anggota PHDI kotamadya Semarang sekitar 300 kepala keluarga, umumnya pegawai negeri sipil dan ABRI. Hal ini disebabkan orang-orang Bali yang datang ke Semarang adalah pegawai negeri, sebagian ABRI, dan sebagian kecil lainnya wiraswasta.

## 2. Struktur Organisasi PHDI

Susunan organisasi HDI terdiri atas PHDI Pusat yang berkedudukan di Denpasar, PHDI tingkat provinsi, PHDI tingkat kabupaten maupun kotamadya, dan PHDI tingkat kecamatan. Paguyuban ini mempunyai pedoman dasar dan pedoman rumah tangga mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pusat. Kepengurusan PHDI ini terdiri atas tiga kelompok pengurus, yaitu yang disebut "Paruman Sulinggih", "Paruman Welaka", dan Pengurus Harian Parisada.

Paruman Sulinggih adalah orang-orang yang didudukkan dan dihormati sebagai pengurus bidang agama. Mereka terdiri atas

para “resi” dan “pandita”. Paruman Walaka adalah orang-orang yang mengetahui agama dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan diangkat sebagai pengurus untuk terjun langsung ke masyarakat. Adapun pengurus harian Parisada bertindak sebagai koordinator pelaksanaan program kerja yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Secara lengkap kepengurusan PHDI kotamadya Semarang masa bakti tahun 1998-2003.

#### I. Paruman Sulinggih

1. Ketua : Pandita I Dewa Bagus Ketut Budra S.Ag
2. Sekretaris : Padita Munadji
3. Anggota : Pandita Sudjono

Tugasnya memberi masukan kepada PHDI kotamadya Semarang sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan Parisada dalam rangka pelaksanaan program pembinaan umat di bidang Dharma Agama.

#### II. Paruman Welaka

1. Ketua : Ngakan Ketut Bawa
2. Sekretaris : Drs. Ngatmo
3. Anggota : Drs. Ketut Djember, I Wayan Budiana, Putu Swajana B.Sc, Ida Bagus Indra, SH., Drs. Made Sudana dan I Made Djenek.

Tugasnya memberi masukan kepada PHDI kotamadya Semarang sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan Parisada dalam rangka pelaksanaan program pembinaan umat, khususnya di bidang pelaksanaan Dharma Negara, sosial budaya, kemasyarakatan dan usaha/dana. Selain itu pengurus ini berperan serta mensukseskan program kerja Parisada.

### III. Pengurus Harian Parisada.

1. Ketua I : Dewa Nyoman Suratna SH.

Tugasnya mengkoordinir pelaksanaan program kerja, memimpin kepengurusan Parisada dan mewakili Parisada dalam kegiatan keluar (Pemerintah, Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi politik lainnya).

2. Ketua II : Drs. I made Yasa, MA.

Tugasnya mengkoordinir pembinaan umat di bidang sosial budaya dan pendidikan serta mengkoordinir pengelolaan tempat persembahyangan termasuk sarana dan inventarisasi penunjangnya.

3. Ketua III : Ir. Nyoman Suthama, Ph.D.

Tugasnya mengkoordinir pembinaan umat di bidang sosial budaya dan pendidikan serta mengkoordinir pengelolaan tempat persembahyangan termasuk sarana dan inventarisasi penunjangnya.

4. Sekretaris I : I Nengah Sorpen Nirmala, Amd.

Tugasnya bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan kesekretariatan Parisada secara tertib dan dinamin, serta membantu kelancaran kesekretariatan "Paruman Sulinggih".

5. Sekretaris II : Ida Bagus Rai Susila S.Ag

Tugasnya membantu Sekretaris I dalam menangani ketatausahaan administrasi Parisada, serta membantu kelancaran kesekretariatan "Paruman Welaka".

6. Bendahara I : Komang Suidiana

Tugasnya mengatur/mengelola keuangan/dana Parisada dengan baik, tertib dan aman.

7. Bendahara II : Nyoya Nyoman Sumatha

Tugasnya mengkoordinir pelaksanaan program penghimpunan dana sebagaimana yang digariskan dalam program kerja.

Seksi-seksi :

1. Upacara Keagamaan dan Jadnya dilaksanakan oleh :  
Kapten I Made Sudra Semarang, Drs. I Nyoman wedu, Drs. I Wayan Mertha, Nyonya Made Ram Karyani, Nyonya Made Ratna dan Nyonya Made Budi Adnyani.  
Tugas Seksi ini mengelola pelaksanaan upacara dan upacara keagamaan.
2. Seksi pendidikan, bertugas mengelola penyelenggaraan pendidikan. Orang-orang yang duduk dalam seksi ini :  
Drs. I Ketut natera, Drs. Anak Agung Ketut Darmadja dan Drs. I Wayan Dukabawa.
3. Seksi Kesenian, bertugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan kesenian. Seksi ini dipegang oleh :  
Drs. I Made Artha, Drs. I Dewa Made Kartaminata, Dewa Gede Sayang Diputera dan Nyoman Sumendra.
4. Seksi Organisasi, bertugas mengelola pengembangan organisasi dan lembaga yang berada di bawah PHDI kotamadya Semarang serta mengelola penyelenggaraan pembinaan umya. Seksi ini dipegang oleh :  
Dewa Putu Weten Asmara SH., Ketut Sudito Rejasa, Made Bagus Winaya SH. dan Wayan Sudiasa SH.
5. Seksi Pembangunan dan Pengelola Inventaris, bertugas memprogramkan dan melaksanakan pembangunan tempat ibadah dan sarana penunjangnya, serta mengelola inventaris barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki PHDI kotamadya Semarang. Seksi ini dipegang oleh :  
Ir. Wayan Sukarya Dilaha MS, Made Sunarya, Ir. I Ketut Cawa dan Ketut Sakayana SH.
6. Seksi Usaha dan Dana, bertugas merencanakan dan menggali sumber dana, dipegang oleh :  
I Nyoman Sudartha, Drs. I Ketut Djingga, I Wayan Githa dan I Gede Sudjana, SE.

7. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Humas ditugaskan kepada : I Made Mertha, Dr. Ngakan Putu Jaya Semadi, I Gusti Ketut Susila, I Nengah Sudra dan Drs. I Nengah Gunada.

Seksi ini bertugas merencanakan dan mengkoordinir kegiatan sosial kemasyarakatan serta mensosialisasikan kegiatan PHDI.

Menurut keterangan seorang responden, semula dalam paguyuban ini seksi atau bidang berjumlah 7, karena nilai 7 mempunyai arti khusus dan suci, antara lain sapta resi atau 7 orang suci yang menerima sabda Suci Weda, dan alam semesta dengan 7 lapisan ke atas dan 7 lapisan ke bawah. Angka tujuh juga terdapat dalam filosofi etika yang disebut Sapta Timira atau tujuh macam kegelapan manusia misalnya sombong (kulina), guna/kesaktian, dhana (kekayaan) dan lain-lain.

Sesuai perkembangan organisasi, selain bidang keagamaan maka kegiatan bidang sosial kemasyarakatan kian meluas mengikuti kondisi dan gerak laju pembangunan dewasa ini. Mengingat hal tersebut dilakukan penambahan seksi yang menitikberatkan ke bidang sosial dan pembinaan sumber daya manusia, yaitu seksi peranan wanita dan kepemudaan.

Seksi peranan wanita bertugas meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu melalui berbagai kegiatan keagamaan, seksi ini dipegang oleh : Ibu Made Artha, Ibu Sri Murni Ardiningsasi Ph.D, dan Nyonya Ketut Sari.

Seksi Kepemudaan bertugas menggalang berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Hindu, seksi ini dipegang oleh: I Putu Indra W, Ir. Paude Made Ratih Widisari, Ni Putu mas Handayani, Davis Hendra Gunawan dan I Dewa Gede Anom.

Susunan dan uraian tugas pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kotamadya Semarang masa bakti tahun 1998-2003 merupakan keputusan dan ketetapan Loka Sabha (musyawarah daerah) PHDI kotamadya Semarang

nomor 9/TAP/1. SABHA V/PHDI. Kotamadya Semarang/1998 dan hasil rapat pengurus harian PHDI kotamadya Semarang pada tanggal 26 Juli 1998 di pura Girinata Semarang, dengan surat keputusan nomor : 2/TAP/PHDI.KODSM/1998 tanggal 26 Juli 1998.

Untuk mengetahui dasar, tujuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada organisasi ini, dapat dilihat dalam Pedoman Dasar dan Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma tahun 1968 berikut ini.

## I. Pedoman Dasar Parisada Hindu Dharma

### Bab I.

Nama, Sifat, dan Kedudukan

#### Pasal 1.

Lembaga ini bernama Parisada Hindu Dharma, selanjutnya dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga disebut Parisada didirikan pada tanggal 23 Februari 1959 untuk jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

#### Pasal 2.

Parisada berbentuk dan bersifat Majelis dari umat yang menganut agama Hindu.

#### Pasal 3.

Kedudukan Pusat Parisada di Denpasar.

### Bab II.

Dasar dan Tujuan

#### Pasal 4.

Parisada berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut ajaran Agama Hindu dan bertujuan mengantarkan umatnya mencapai kebahagiaan lahir bathin dalam masyarakat Pancasila.

Bab III.  
Tugas dan Kewajiban  
Pasal 5.

Untuk mencapai tujuan Parisada mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Mengatur, menunjuk, memperkembangan dan membina kehidupan umat yang menganut agama Hindu dalam lapangan keagamaan sesuai dengan sastra-sastranya.
- b. Meningkatkan pengabdian umatnya kepada masyarakat dalam lapangan sosial, ekonomi, budaya dan kenegaraan di samping tugasnya dalam bidang spiritual.
- c. Mengadakan, memelihara dan mempererat hubungan secara konsultatif dengan setiap orang dan badan-badan yang bergerak berdasarkan agama dalam lapangan kemasyarakatan.

Bab IV.  
Susunan Lembaga Parisada  
Pasal 6.

Lembaga Parisada tersusun :

1. a. Parisada Pusat untuk Tingkat Nasional  
b. Parisada Daerah untuk Tingkat Provinsi, Kecamatan, Desa dan Banjar atau wilayah- wilayah yang disamakan dengan itu.
2. Di Ibukota R.I Parisada mengangkat sebuah perwakilan Parisada Pusat
3. Untuk daerah-daerah yang dipandang perlu Parisada dapat mengangkat perwakilan yang mewakilinya di daerah yang bersangkutan.

Pasal 7.

1. Parisada pada setiap tingkat terdiri dari Pesamuhan Sulinggih dan Pesamuhan Welaka, yang masing-masing mempunyai ketua.

2. Parisada Pusat terdiri dari 11 anggota Sulinggih dan 22 anggota Welaka.
3. Dimana keadaan tidak memungkinkan dapat diadakan perkecualian.

#### Bab V

#### Pimpinan dan Masa Jabatan

#### Pasal 8

1. a Parisada Pusat dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari Ketua Pesamuhan Sulinggih, Ketua Pesamuhan Welaka dan Sekretaris yang dipilih Anggota Pesamuhan
2. Susunan Pengurus terdiri :  
Ketua Umum ialah Ketua Pesamuhan Sulinggi  
Ketua I ialah Ketua Pesamuhan Welaka  
Ketua II ialah Wakil Ketua Pesamuhan Sulinggih  
Ketua III ialah Wakil Ketua Pesamuan Welaka
3. Parisada Daerah dipimpin oleh Pengurus Parisada Daerah yang terdiri dari Ketua I, Ketua II, Ketua III.
4. a. Pengurus Parisada Pusat dipilih oleh Maha Sabha dan mempunyai masa jabatan 4 tahun  
b. Pengurus Parisada Daerah dipilih oleh Loka Sabha dan mempunyai masa jabatan 3 tahun

#### Pasal 9

1. Untuk melancarkan pekerjaan Parisada dibentuklah Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.
2. Sekretariat terdiri dari bagian-bagian sesuai dengan keperluan

#### Pasal 10

Sekretaris Parisada Pusat disebut Sekretaris Jendral.

### Pasal 11

Pengurus Parisada mewakili Parisada kedalam dan keluar

### Bab VI

### Sidang-sidang

### Pasal 12

Parisada mempunyai sidang-sidang sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat :
  - a. Maha Sabha
  - b. Pesamuhan Agung
  - c. Pesamuhan Sulinggih
  - d. Pesamuhan Welaka
2. Di Tingkat Daerah :
  - a. Loka Sabha
  - b. Paruman Parisada
  - c. Paruman Sulinggih
  - d. Paruman Welaka

### Pasal 13

1. Maha Sabha mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diadakan setiap 4 tahun sekali yang dihadiri oleh Parisada Provinsi dan Daerah Kabupaten
2. Loka Sabha diadakan 3 tahun sekali yang dihadiri oleh Parisada Daerah yang berada dalam lingkungan daerahnya.

### Pasal 14

Sabha adalah syah apabila dihadiri oleh sebagian terbesar dari Parisada yang berada di wilayahnya.

### Bab VII

### Dana

### Pasal 15

1. Keuangan Parisada didapat dari :
  - a. Sumbangan tetap atau berkala dari pemerintah atau perseorangan yang tidak bertentangan dengan agama

- b. Puna yang berupa barang atau tanah maupun bangunan dari pihak dermawan atau badan lain.
2. Kekayaan dan anggaran keuangan Parisada diurus dan berada dibawah tanggung jawab Pengurus

Bab VIII

Ketentuan-ketentuan Lain

Pasal 16

Keputusan Parisada mengingat seluruh umatnya

Pasal 17

Perubahan Pedoman Dasar hanya dapat dilakukan oleh Maha Sabha

Bab IX

Penutup

Pasal 18

Segala sesuatu yang belum dimuat dalam Pedoman Dasar diatur lebih lanjut dalam Pedoman Rumah Tangga. Disyahkan di Denpasar pada tanggal 4 Desember 1968, atas nama Sabha Parisada Hindu Dharma II, Ketua I tertanda tertanda Ida Pedanda Gd. Wayan Sidemen, dan Sekretaris I tertanda Cok. Rai Sudharta M.A

II. Pedoman Rumah Tangga  
Parisada Hindu Dharma Pusat

Bab I

Pembentukan

Pasal 1

Di tingkat Kotamadya/Kabupaten hanya dibentuk satu badan Parisada.

Bab II  
Pengurus  
Pasal 2

1. Pengurus Parisada Hindu Dharma Provinsi untuk permulaan kali dapat ditunjuk oleh Parisada Hindu Dharma Pusat.
2. Penentuan Pengurus selanjutnya ditetapkan oleh Loka Sabha.
3. Pergantian pengurus dilakukan berdasarkan prinsip Utpti, Sthiti, Pralina.  
Pengurus Parisada Hindu Dharma di daerah-daerah sedapat mungkin supaya mencerminkan unsur umat Hindu keseluruhannya yang ada di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan Sabha II No.IV/Kep/PHDP/68.

Bab III  
Pengesahan  
Pasal 4

1. Kabupaten/Kotamadya yang telah mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Pusat tentang susunan pengurusnya dimana belum terbentuk Parisada Hindu Dharma tingkat propinsi, disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat.
2. Pengesahan pengurus tersebut pada ayat (1) akan dilakukan setelah calon-calon Pengurus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 5

1. Pengesahan Parisada Hindu Dharma Propinsi dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat.
2. Dalam hal Parisada Hindu Dharma Propinsi telah terbentuk, pengesahan Parisada Hindu Dharma Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat, setelah mendapat persetujuan dari Parisada Hindu Dharma Propinsi.

3. Pengesahan Parisada Hindu Dharma dibawah Kabupaten diatur sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini.

#### Bab IV

#### Kegiatan - Pengurus

#### Pasal 6

Kegiatan Pengurus Parisada Hindu Dharma terbatas di wilayahnya kecuali seizin Parisada Hindu Dharma setingkat di atasnya.

#### Bab V

#### Penggunaan Istilah

#### Pasal 7

Istilah dalam susunan pengurus berpegang kepada Keputusan Sabha II

#### Pasal 8

Dalam menyebutkan sesuatu badan Parisada Hindu Dharma harus tegas menggambarkan wilayahnya dengan menyebutkan : Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, dan lain-lain

#### Bab VI

#### Hubungan Dengan Organisasi Lain

#### Pasal 9

Hubungan dengan organisasi-organisasi diluar negeri yang memakai dasar Hindu Dharma maupu organisasi-organisasi yang berdasarkan keagamaan lain yang sah perlu dibina dan dikembangkan.

#### Bab VII

#### Lambang

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai Lambang tanda pengenal, papan nama dan stempel diatur oleh Parisada Hindu Dharma Pusat

Bab VIII  
Penutup  
Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur oleh Pedoman Rumah tangga ini, diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat.

Disahkan di Denpasar pada tanggal 23 Februari 1970, atas nama Pesamuhan agung Parisada Hindu Dharma, Ketua Umum tertanda Pedanda Putra Kemenuh, dan Sekretaris I Ida Bagus Astawa.

Selain PHDI ini ada perkumpulan khusus untuk kaum wanita yaitu WHDI atau Wanita Hindu Dharma Indonesia kotamadya Semarang dan KMHS atau Keluarga Mahasiswa Hindu Semarang. Kedua perkumpulan ini berada di bawah naungan PHDI kotamadya Semarang.

### **C. Kegiatan PHDI**

Dalam Pedoman Dasar bab I dan bab II tercantum bahwa lembaga PHDI merupakan paguyuban dari umat yang menganut agama Hindu dan bertujuan mengantarkan umatnya mencapai kebahagiaan lahir bathin dalam masyarakat Pancasila. Selanjutnya dalam Bab III antara lain dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, paguyuban mempunyai tugas dan kewajiban membina kehidupan umat yang menganut agama Hindu dalam lapangan keagamaan, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam lapangan sosial ekonomi dan budaya serta memelihara dan mempercepat hubungan dengan setiap orang dan badan-badan yang bergerak berdasarkan agama dalam lapangan kemasyarakatan. Sesuai dengan tujuan paguyuban ini, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yaitu agama Hindu dan kemasyarakatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang menjiwai paguyuban ini adalah konsep Tri Hita Karana atau tiga sumber atau penyebab kebahagiaan

dan kesejahteraan. Tiga sumber atau tiga penyebab kebahagiaan tadi adalah :

1. Kahyangan, yaitu memelihara keseimbangan dengan sang Pencipta yang dinyatakan dan diwujudkan dengan melakukan doa, berbagai upacara dan sembahyang di pura. Dengan doa dan sembahyang manusia berharap mendapat perlindungan dari berbagai bencana dan malapetaka, serta diberi segala kebutuhan hidup. Satu diantara wujud untuk menyatakan rasa syukur adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan melaksanakan sembahyang.
2. Pawongan, yaitu memelihara keseimbangan hubungan dengan manusia atau orang lain dengan cara saling menghargai sesama manusia dan jangan menyakiti dan diwajibkan berbuat kebaikan antara sesama manusia.
3. Palemahan, yaitu memelihara keseimbangan dengan alam semesta, terutama dengan alam lingkungan hidup tempat tinggal manusia, manusia harus memelihara, menghormati dan menyayangi alam dengan segala isinya. Untuk melestarikan semesta dengan segala isinya dilakukan upacara yang disebut Bhuta Yadnya.

Kegiatan PHDI kotamadya Semarang yang bersifat rutin adalah pertemuan pengurus dengan anggota yang diselenggarakan di pura Girinata yang letaknya sekitar 5 km dari pusat kota, pada minggu kedua tiap bulan. Dalam pertemuan tersebut antara lain dilakukan sembahyang bersama, Darmawacana atau khotbah agama Hindu oleh Pinandita. Selain itu diisi dengan diskusi atau tatap muka untuk membahas masalah keagamaan. Untuk menarik kehadiran para anggota, diadakan arisan terutama para ibu serta pembuatan rangkaian janur untuk sesajen atau "bebanten".

Agama Hindu sangat berperan dalam kehidupan dan memberikan corak yang khas bagi identitas masyarakat Bali, demikian pula kegiatan paguyuban ini. Akitivitas keagamaan

muncul dalam frekwensi yang tinggi, baik secara keluarga maupu kelompok yang lebih besar seperti paguyuban. Upacara keagamaan digolongkan dalam lima macam yang disebut “Panca Yadnya” yaitu :

1. “Dewa Yadnya”, yaitu upacara yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widhi yang dilaksanakan di pura-pura umum dan pura-pura keluarga.
2. “Manusia Yadnya”, yaitu upacara untuk keselamatan manusia di dunia ini, meliputi upacara daur hidup dari masa kehamilan sampai masa dewasa.
3. “Pitra Yadnya”, yaitu upacara yang ditujukan kepada roh-roh leluhur, meliputi upacara kematian sampai upacara penyucian leluhur misalnya ngaben, nyekah/memukur.
4. “Rsi yadnya”, yaitu upacara penobatan atau pentasbihan pendeta secara adat dan agama.
5. “Bhuta yadnya”, yaitu upacara korban yang dipersembahkan kepada bhuta (mahluk halus) agar mereka tidak mengganggu dan merusak alam dengan isinya. Upacara ini dilakukan pada saat menjelang hari Raya Nyepi.

Selain lima macam upacara tersebut, ada beberapa upacara yang diperingati dan dilaksanakan seluruh umat Hindhu yaitu Hari Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi dan hari Raya Nyepi yang dilaksanakan setahun sekali. Kemudian upacara yang dilakukan secara rutin yaitu Purnama, Tilem dan Kajeng Keliwon.

Purnama adalah upacara pada saat bulan penuh yang jatuh hari ke 15, dan upacara dilaksanakan satu hari sebelum purnama atau tanggal 14 yang disebut “Purnaning Purnama”. Tilem adalah upacara pada saat bulan mati atau tak ada bulan, dilaksanakan sehari sebelum bulan mati yang disebut “Purwaning Tilem”. Hari-hari ini adalah hari matahar, sang Hyang Surya dan bulan Sang Hyang Bulan menyertai Sang Hyang Widi Wasa memeriksa surga (heaven). Purnama dan

Tilem dianggap hari suci/sakral, karena itu diadakan upacara dan sesajen, yang diadakan 15 hari sekali.

Di samping itu ada upacara Kajeng Keliwon yaitu hari sakral yang jatuh tiap 15 hari. Hari ini Sang Hyang Siwa bermeditasi, dan umat Hindu melaksanakan buta yadnya yaitu berdoa dengan menggenggam padi atau nasi. Upacara ini dilaksanakan di pura kecil yang terdapat di setiap rumah dan sesajen beserta padi atau nasi diletakkan di muka gapura dengan doa memohon keselamatan dan perlindungan dari gangguan Betara Kala dalam rumah tangganya.

Untuk melestarikan pelaksanaan upacara keagamaan, dilakukan kegiatan antara lain:

1. Merawat pura agar tetap bersih dan suci sebagai tempat persembahyangan.'
2. Merawat bangunan dan segala sarananya misalnya atribut-atribut, perlengkapan upacara dalam gapura, kain selubung dan lain-lain.
3. Melakukan penyucian pura secara periodik dan insidental pada setiap upacara keagamaan yang akan dilakukan.

Perlengkapan upacara dalam pura antara lain padmasana yaitu semacam altar sebagai pusat upacara dan persembahyangan arca lingga (semacam arca atau boneka kecil), umbul-umbul, mamas dan badrang (sejenis tombak), payung pagat yaitu payung yang terbuat dari bambu, tedung agung (payung kebesaran), dan lain-lain.

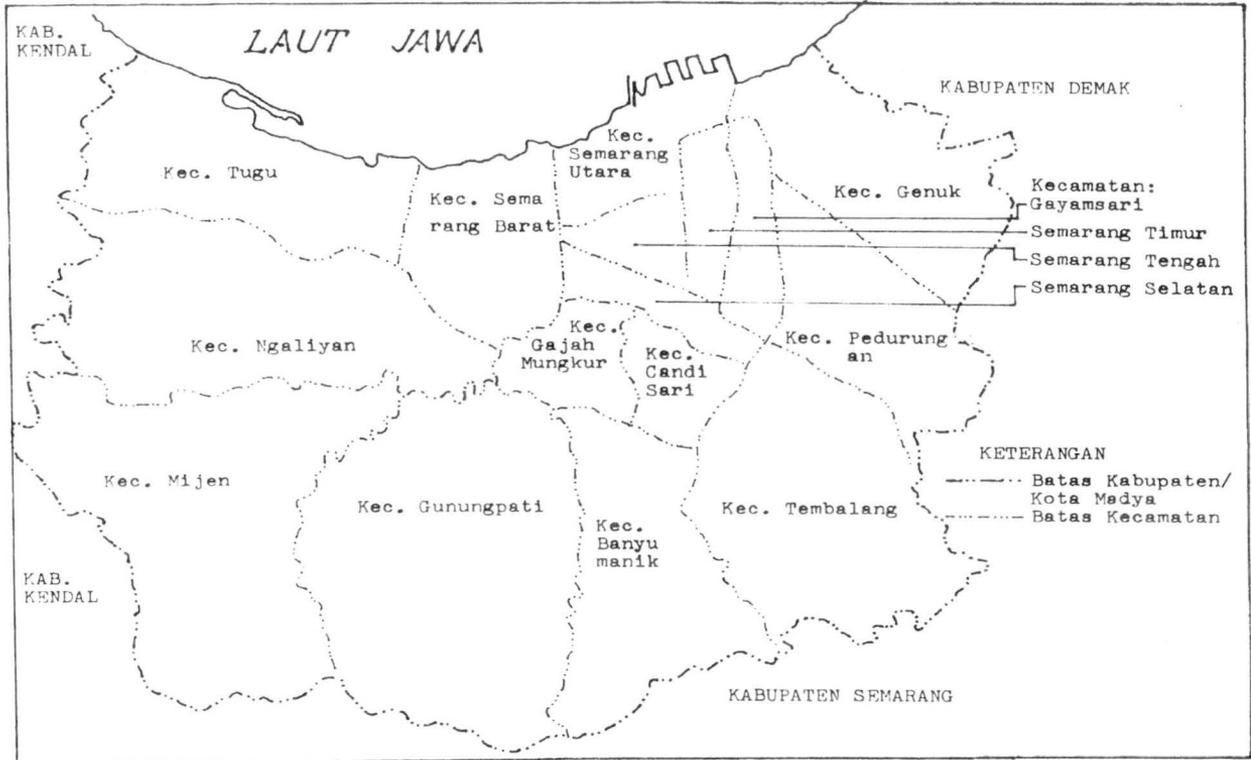
Perawatan pura dengan segala perlengkapannya memerlukan tenaga dan dana yang cukup tinggi. Untuk keperluan pura dan sesajennya, dana diperoleh dengan menarik iuran tetap dari para anggota. Di samping itu dana pembangunan dan pemelihara pura diperoleh dari sumbangan warga, bantuan pemerintah daerah setempat maupun dari pemerintah daerah Bali sebagai pusat PHDI.

Pada setiap upacara keagamaan, para ibu bertugas menyiapkan sesajen, dibantu anak remaja agar mereka mengetahui cara menyiapkan sesajen atau bebanten. Pada waktu membuat persiapan bebanten kegiatan pokok adalah membuat rangkaian dari janur yang disusun bersama buah-buahan, bunga-bunga dan daun-daunan lainnya. Beberapa jenis sesajen atau bebanten antara lain “lamak” berupa hiasan terbuat dari daun lontar yang dipasang pada bangunan suci dan pada penjor. Canang sari yaitu suatu tempat beralas daun-daun atau “pelawa” dan di atasnya diberi janur, ambu, bunga, buah-buahan, umbi-umbian dan sebagainya. Penjor merupakan lambang saria tahun (hasil bumi) yang diperbahkan kepada Sang Hyang Widhi.

Cara merangkai janur, daun-daunan dan buah-buahan untuk keperluan sesajen ini diajarkan kepada anak remaja pada setiap pertemuan rutin maupun pertemuan lainnya di pura Girinata. Sebagai satu diantara cara mengobat rasa rindu kepada kampung halaman serta tradisi dan budayanya, dalam setiap kesempatan pertemuan dan kegiatan, sebagian ibu-ibu membawa masakan khas daerah Bali, misalnya anyang yaitu masakan dari babi cincang dicampur dengan nangka muda dan kelapa. Masakan ini dijual kepada yang menginginkan dan uangnya untuk mengisi khas paguyuban. Sebagai cara untuk merangsang generasi muda maupun kaum ibu agar melestarikan tradisi keagamaan adalah mengadakan lomba membuat sesaji pada event-event tertentu.

Di tingkat kecamatan, PHDI juga mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali, anantara lain PHDI kecamatan Semarang Timur diadakan pada minggu I, PHDI kecamatan Semarang Selatan pada minggu III, dan kecamatan Semarang Barat dan Mijen diadakan pada minggu IV. Pertemuan tersebut diisi dengan kegiatan keagamaan, arisan dan lain-lain yang dipimpin oleh pengurus tingkat kecamatan maupun pengurus tingkat kotamadya.

# Peta I



Sumber: Kodya Semarang  
Dalam Angka 1996

KOTA MADYA SEMARANG

### **BAB III**

## **PERANAN PHDI TERHADAP ANGGOTANYA**

#### **A. Kehidupan Sosial**

Paguyuban Parisada Hindu Dharma Indonesia berdasarkan agama Hindu. Sebagian besar pengurus dan anggotanya adalah etnis Bali. Pandangan hidup masyarakat Bali sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh agama Hindu dan kebudayaan Bali. Dalam pandangan hidup tersebut terkandung pikiran-pikiran terdalam mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik dan menilai tinggi kehidupan yang didasarkan pada asas kebersamaan dan asas berbakti. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, melainkan dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakat dan alam sekitarnya.

Asas kebersamaan mendorong warga untuk lebih berorientasi terhadap sesamanya, dan rasa berbakti membangkitkan kesetiaan yang diwujudkan dalam bentuk korban suci anatar lain dengan upacara-upacara. Pandangan hidup itulah yang menjadi satu diantara pendorong atau motivasi kegiatan gotong royong dalam bidang kemasyarakatan paguyuban PHDI kotamadya Semarang. Kegiatan yang sangat menonjol dan dirasakan para anggotanya adalah ketika diantara anggota paguyuban mendapat musibah atau kemalangan misalnya meninggal, sakit atau kecelakaan.

Apabila ada anggota yang mendapat musibah misalnya meninggal dunia, pengurus segera memberitahukan kepada

para anggota yang lain agar mereka ikut meringankan beban dan memberi bantuan sesuai tugas dan kemampuannya. Bantuan yang diberikan antara lain mengurus jenazah, mengadakan upacara sampai proses terakhir yaitu upacara nganyut di pantai Marina.

Di tempat kediaman keluarga yang sedang berduka para "Paruman Sulinggih" datang menghibur serta membaca mantera-mantera dan doa-doa yang diikuti oleh pengurus maupun anggota yang hadir. Selain itu juga membaca kidung-kidung suci agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan mendapat perlindungan dari Hyang Widhi Wasa. Sementara itu, anggota lain khususnya kaum laki-laki membantu menyiapkan tempat untuk memandikan mayat atau "asagen" dan perlengkapan lain yang diperlukan. Adapun para wanita terutama kaum ibu membantu menyiapkan sesajen atau "bebanten" dan perlengkapan upacara, termasuk merangkai sesajen (majejahitan), mencari bunga dan sebagainya. Dengan demikian anggota yang sedang mendapat musibah tersebut bebannya tidak terlampau berat karena mendapat bantuan spiritual, material dan bantuan tenaga dari PHDI melalui pengurus dan anggotanya.

Dalam kegiatan ini, terutama pada waktu mengadakan upacara-upacara yang berkaitan dengan kematian tersebut, peranan para wanita sangat menonjol, bahkan kegiatan membuat bebanten (sesajen) merupakan monopoli kegiatan wanita. Amat jarang pelaksanaan upacara-upacara dilakukan oleh laki-laki, kecuali mempersiapkan peralatan-peralatan yang relatif besar seperti membuat "tetaringan" atau tempat untuk menyelenggarakan upacara. Kegiatan khusus lainnya yang dikerjakan para wanita dalam rangkaian upacara adalah "mekidung" yaitu menyanyikan lagu suci pada saat upacara yang biasanya dilakukan secara bersama atau "koor".

Menurut keterangan informan yang menjadi pengurus PHDI kotamadya Semarang, sehubungan dengan upacara kematian, di Semarang pernah dilakukan upacara "ngaben" yang dilaksanakan di krematorium Semarang. Dalam upacara

ngaben tersebut segala bebanten, jalannya upacara, doa, mantera dan pelaksanaannya tidak berbeda dengan upacara ngaben yang diadakan di Bali. Namun demikian diakuinya bahwa ada juga perbedaan secara fisik yaitu atribut-atribut dan benda-benda lambang upacara yang biasanya terlihat dalam arak-arakan pada waktu upacara ngaben di Bali, tidak terdapat dalam upacara ngaben di Semarang. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi makna dan tujuan upacara karena lebih cenderung kepada kepentingan duniawi yang menggambarkan status sosial keluarga yang meninggal. Semakin tinggi status sosial dan tingkat ekonominya, akan semakin banyak dan lengkap atribut yang ditampilkan dan kemudian ikut dibakar dalam upacara ngaben pada akhir upacara, setelah jenazah dikremasi lalu abu jenazah dikumpulkan ditempatkan dalam sebuah wadah, terakhir dengan prosesi atau arak-arakan abu jenazah tersebut dibuang ke laut di lokasi pantai Marina.

Apabila ada anggota yang sakit atau melahirkan paguyuban ini mengutus beberapa pengurus dan anggotanya untuk menjenguk dan menyampaikan bantuan atau sumbangan ala kadarnya sebagai tanda kebersamaan diantara anggota paguyuban.

Dalam kehidupan orang Bali bertalian erat dengan hakekat dan ciri kehidupan sosial, yang ditandai dengan penonjolan kesadaran kolektif yang tinggi, atas dasar suka maupun duka. Suatu masalah merupakan beban yang harus ditanggung bersama, hal tersebut tercermin dalam paguyuban ini. Bila dalam suasana berduka diperlihatkan kedalam sikap-sikap dan rasa kebersamaan para anggota PHDI, adalah sebagai bagian kolektif seakan-akan ikut terlibat dan merasakan kematian tersebut, begitu pula dalam suasana suka.

Dalam upacara perkawinan menurut adat Bali, sahnya suatu perkawinan apabila sudah melakukan upacara "pami mahan". Dalam upacara ini selain persiapan untuk keperluan merias calon pengantin juga diperlukan perlengkapan untuk upacara sesajen (bebanten-Gambar 1.) Selain paruman

sulinggih, paguyuban PHDI mempunyai seksi upacara keagamaan dan upacara keagamaan. Sehubungan dengan itu, pihak paguyuban senantiasa memberi bantuan kepada para anggota yang memerlukannya, seperti halnya upacara perkawinan. Untuk keperluan upacara keagamaan dan persembahyangan, paguyuban ini dapat membantu melaksanakan upacara berikut bebanten atau sesajennya. Biasanya para wanita dibantu remaja putrinya menyiapkan bahan-bahan untuk “bebanten” misalnya daun kelapa muda (busung) atau janur, “selepan” yaitu daun kelapa hijau, daun pisang, sirih, berbagai jenis bunga dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut beserta buah-buahan dan beberapa jenis makanan tertentu disusun atau dirangkai menjadi sesajen yang khas dengan ciri budaya Bali.

Akhir-akhir ini, bantuan PHDI dalam upacara perkawinan anggotanya disamping bantuan secara ritual dan administrasi juga menyumbangkan tari Bali untuk memeriahkan upacara tersebut.

## **B. Kehidupan Ekonomi**

Sebagian besar anggota Parisada Hindu Dharma di kotamadya Semarang adalah karyawan baik pegawai negeri sipil maupu ABRI dan karyawan pada lembaga atau perusahaan milik swasta di kotamadya Semarang dan sekitarnya. Meskipun ada yang berstatus pedagang atau wiraswasta, jumlahnya sangat kecil dibandingkn yang bekerja sebagai karyawan dan guru.

Berkenan dengan mata pencaharian tersebut, maka kondisi ekonomi anggota Parisada ini dapat dikatakan dalam tingkat sedang atau tingkat menengah, bahkan sebagian ekonomi tingkat atas. Hal demikian dapat mendukung kelangsungan dan kemajuan kegiatan dalam kehidupan paguyuban. Meskipun peranan Parisada dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlihat dan dirasakan secara langsung oleh anggotanya, namun secara tidak langsung peranan tersebut ada.

Pegawai negeri yang beretnis Bali di kotamadya Semarang bekerja di berbagai instansi seperti Pemerintah Daerah (dibawah Departemen Dalam Negeri), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi dan berbagai instansi lainnya yang terdapat di kotamadya Semarang. Adapun pegawai lainnya bekerja di bank-bank negeri dan swasta, perusahaan-perusahaan dan lembaga lainnya, sedangkan ABRI sebagian besar adalah anggota TNI Angkatan Darat dan Kepolisian.

Tingkat ekonomi sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia erat pula kaitannya dengan pendidikan. Begitu pula sebaliknya, pendidikan yang memadai memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga dapat dicapai oleh keluarga yang tingkat ekonominya menengah keatas. Dalam hal ini, Parisada Hindu Dharma memperhatikan pendidikan bagi anggota-anggota dan keluarganya. Menurut keterangan beberapa informan, Parisada juga memberi beasiswa bagi putera-putera yang orang tuanya tergabung menjadi anggota Parisada Hindu Dharma. Beasiswa ini diberikan untuk pendidikan umum, baik formal maupun non formal.

Bentuk lain dari bantuan Parisada kepada anggota yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan adalah memberi tempat penampungan sementara kepada siswa dan mahasiswa asal Bali yang pergi ke Semarang untuk melanjutkan sekolah atau kuliah pada Perguruan Tinggi di kota ini. Sebelum siswa atau mahasiswa yang datang dari Bali memperoleh tempat tinggal, untuk sementara ditampung di suatu keluarga Bali anggota Parisada, yang sudah menetap di kotamadya Semarang.

Keluarga yang menampung ini selain merasa satu paguyuban juga didorong adanya ikatan batin dengan kampung halaman dan komunitasnya yang berada di pulau Bali. Menurut informan dalam paguyuban ini ada ikatan moral yang kuat diantara para anggota dan pengurus. Oleh karena itu tidak mengherankan bila diantara para pengurus dan anggotanya

terdapat rasa kebersamaan, ingin membantu kepada yang membutuhkan dan saling tolong menolong.

Kegiatan Parisada Hindu Dharma yang berjalan secara rutin tentu memerlukan dukungan dana, baik dalam kegiatan sosial budaya maupun kegiatan keagamaan. Tanpa dukungan dana kegiatan tidak akan berjalan dengan baik, dan hal ini disadari betul oleh pengurus dan anggota-anggotanya. Strategi yang diterapkan pada paguyuban ini sehingga dapat tetap berjalan dan melaksanakan berbagai kegiatan adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Yang dimaksud potensi disini adalah kemampuan, keterampilan dan semangat yang dimiliki setiap anggota maupun relasi. Kebutuhan anggota Parisada Hindu Dharma di kotamadya Semarang sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil maupun karyawan swasta serta ABRI yang kondisi ekonominya cukup baik, sehingga untuk menarik iuran tidak begitu sulit. Selain itu sebagian dari mereka dengan rela memberikan sumbangan secara rutin maupun insidental pada saat tertentu misalnya menghadapi penyelenggaraan upacara-upacara pada hari Raya, musyawarah daerah dan sebagainya.

Pada Parisada Hindu Dharma tingkat kecamatan di kotamadya Semarang diadakan kegiatan menabung, kemudian yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan secara bergantian. Meskipun bantuan berbentuk modal belum pernah diberikan kepada anggota, Parisada dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain seperti mengusahakan kredit barang dan simpan pinjam kepada anggotanya. Kegiatan lain yang berkaitan dengan ekonomi adalah secara rutin pada setiap pertemuan beberapa ibu membuat masakan khas Bali yang dijual kepada anggota atau siapa saja yang menaruh minat. Cara ini selain untuk menambah uang kas juga dapat menambah pemasukan bagi ibu-ibu tadi.

Pada hari Raya Kuningan, Galungan, Saraswati, dan hari-hari besar agama Hindu lainnya selalu diperingati dengan upacara-upacara keagamaan yang wajib dilaksanakan bagi pemeluknya. Untuk mengadakan upacara-upacara tersebut secara bersama-sama di pura Girinata. Sebelum hari Raya para

pengurus sudah mulai mengumpulkan dana dan mengkoordinir para anggotanya untuk melaksanakan upacara dimaksud bersama-sama. Dengan demikian biaya dapat ditanggulangi secara kolektif sehingga meringankan anggotanya.

### **C. Kehidupan Budaya**

Pengaruh agama Hindu dalam kehidupan masyarakat Bali sangat besar. Agama Hindu yang memiliki tiga kerangka dasar yaitu Statwaö yaitu filsafat keagamaan, “susila” yaitu moral keagamaan dan upacara keagamaan, memberi warna yang khas bagi identitas masyarakat Bali. Bagi umat Hindu mereka percaya terhadap Panca Cradha atau lima hal yaitu : percaya adanya Tuhan, Ida Sang Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk konsep Trimurti, percaya terhadap konsep “atman” (roh abadi), percaya tentang “punar bhawa” (kelahiran pala” (buah dari setiap perbuatan), dan percaya akan adanya moksa.

Satu diantara wujud kepercayaan ini adalah adanya aktivitas ritual dalam bentuk pemujaan leluhur dan upacara-upacara keagamaan. Adapun upacara keagamaan yang pokok ada lima macam yang disebut “panca yadnya”. Lima macam jenis upacara tersebut adalah :

1. “Manusia yadnya”, meliputi upacara daur hidup.
2. “Pitra yadnya”, yaitu upacara yang ditujukan kepada roh-roh leluhur.
3. “Dewa yadnya”, meliputi upacara-upacara pada pura dan kuil keluarga.
4. “Resi yadnya”, yaitu upacara yang berhubungan dengan pentasbisan pendeta.
5. “Bhuta yadnya”, merupakan upacara-upacara yang ditujukan kepada “Bhuta” dan “Kala”, yaitu roh-roh di sekitar manusia yang mengganggu.

Berbagai upacara tersebut menyebabkan masyarakat yang beragama Hindu senantiasa melaksanakan serangkaian upacara setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari. Nampaknya upacara sudah merupakan kehidupan sehari-hari, karena bagi yang tidak melaksanakan merasa ada semacam sanksi yang menimpa dirinya. Sebaliknya jika telah melakukan upacara mereka merasa aman dan tenteram, karena telah melaksanakan kewajiban.

Dalam setiap upacara keagamaan pada orang Bali tentu tidak lepas dengan bebanten atau sesajen. Menyiapkan dan merangkai sesajen sudah menjadi pekerjaan yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita Bali, khususnya kaum ibu setiap saat. Hal ini mendorong para ibu untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan kepada putera-putrinya dengan mengikutkan mereka dalam berbagai upacara semenjak masih kanak-kanak.

Pada pertemuan anggota Parisada Hindu Dharma kotamadya Semarang yang diadakan sebulan sekali, diisi dengan acara yang bersifat pembinaan dan pendidikan keagamaan. Kegiatan tersebut antara lain bersembahyang bersama di pura Grinata, ceramah dan diskusi keagamaan dan lain-lain. (Gambar 2). Bagi remaja diajarkan cara menyusun dan merangkai kebanten untuk upacara, misalnya membuat "sampian" yaitu hiasan janur untuk sesajen. Untuk merangsang minat para remaja, kadang-kadang pihak Parisada mengadakan lomba merangkai bebanten yang disebut "pajegan" atau "penjoran" yaitu rangkaian bebanten yang terdiri atas buah-buahan, bunga-bunga dan janur, sebagai lambang persembahan kepada Sang Hyang Widhi Wasa.

Selain pelajaran membuat dan menyusun sesajen, juga diadakan pelajaran dan latihan menari dan karawitan, yang tergabung dalam perkumpulan kesenian (pesantian) Sekehe Gong Puspa Giri (Gambar 3). Latihan gamelan dan tari dilakukan pada hari Rabu dan Jum'at sore, bertempat di balai Sabha yang berada di lingkungan pura Girinata.

Sesuai dengan keyakinan masyarakat Bali, bahwa rasa bakti itu diwujudkan dalam bentuk korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan/Hyang Widhi Wasa, kepada sesama manusia, juga kepada alam lingkungannya. Bentuk korban atau yadnya yang dipersembahkan tidak terbatas dalam bentuk upacara-upacara panca yadnya, melainkan dalam bentuk tindakan atau pekerjaan baik, sumbangan pemikiran dan memberi sumbangan atau sedekah. Pendangan hidup ini menjadi pedoman masyarakat Bali dan Parisada Hindu Dharma khususnya, sehingga dapat mewujudkan perbuatan yang nyata dalam bentuk tolong menolong dan gotong royong di kalangan anggotanya.

Berkaitan dengan ajaran agama Hindu, Parisada sudah menggalakan pembinaan mental dan spritual terhadap anggotanya melalui kegiatan yang dilaksanakan secara rutin maupu insidental. Pada setiap hari Minggu diselenggarakan pelajaran agama Hindu bagi anak-anak untuk tingkat Sekolah Dasar, tingkat Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Pendidikan yang diadakan di lingkungan pura ini pada minggu pertama diliburkan karena disediakan untuk acara keluarga. Menurut penuturan anggota dan pengurus Parisada, pendidikan agama Hindu bagi anak-anak sangat perlu karena pendidikan agama yang diterima di sekolah kurang memadai. Lokasi yang berada di halaman pura (Pawongan) sekaligus menanamkan nilai religius secara langsung kepada anak-anak, sehingga dapat memahami dan menghayati ajaran agama dan adat secara bersamaan. Oleh karena itu, selain pelajaran agama Hindu juga diajarkan kesenian (pesantian) terutama yang berkaitan dengan upacara.

Dengan demikian seorang warha sudah mulai dikenalkan dengan pengetahuan dan praktek keadatan dan keagamaan sedini mungkin. Melalui kegiatan pesantian dan kesenian diharapkan dapat membina pola hidup anggota Parisada, terutama untuk menjaga disiplin rohaninya. Nilai sosial kemasyarakatan yang tertuang dalam Parisada dapat memberi motivasi kepada anggotanya untuk berorientasi kepada

kepentingan orang banyak dalam keadaan suka dan duka. Kebersamaan dalam duka dan suka mewujudkan semangat gotong-royong dan asas kekeluargaan, mendorong anggota Parisada untuk menyelaraskan dan menyerasikan hidupnya dengan sesamanya, yang secara konseptual dilandasi ta-twa-asi dalam falsafah Hindu.

#### **D. Kehidupan Politik**

Dalam Pedoman Dasar Parisada Hindu Dharma Bab II tentang Dasar dan Tujuan, pasal 4 menyebutkan bahwa Parisada berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut ajaran agama Hindu dan bertujuan mengantarkan umatnya mencapai kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat Pancasila. Bila ditinjau kembali kegiatan Parisada yang telah diuraikan sebelumnya kiranya tercermin apa yang menjadi tujuan Parisada ini yang sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila.

Konsep Trihita Karana menjiwai Parisada Hindu Dharma yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan kemakmuran hidup menurut pandangan agama Hindu yaitu Tuhan, manusia dan alam lingkungan. Bila ketiga unsur yang tercakup dalam Trihita Karana dapat terjalin hubungan yang harmonis, akan tercapai kebahagiaan. Demikian pula kegiatan yang dilaksanakan Parisada Hindu Dharma telah memupuk dan membina anggotanya yang menganut agama Hindu untuk mematuhi ketentuan dan sastra-sastranya. Pembinaan dilakukan dengan mengadakan pendidikan agama kepada anak-anak dan remaja serta melatih dan membimbing mereka dalam kegiatan seminar, diskusi dan mekemit di pura, tidak lain untuk menciptakan keselarasan hubungan antara warga/anggota dengan Tuhan Yang Maha Esa (Gambar 4). Kegiatan ini sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Parisada juga membina dan memelihara baik hubungan dengan badan-badan yang bergerak berdasarkan agama lain (diluar Hindu) dalam lapangan kemasyarakatan. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam kehidupan politik, Parisada Hindu Dharma mengajak dan membina anggotanya/warganya untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam lapangan sosial, ekonomi, budaya dan kenegaraan disamping tugasnya membina dan meningkatkan kehidupan spiritual atau keagamaan. Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan selalu melalui musyawarah diantara pengurus dan anggota karena Parisada menjunjung tinggi musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya dalam musyawarah selalu diutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini tercermin dalam pemilihan pengurus seperti ketua umum, ketua, sekretaris dan seksi-seksi melalui cara yang demokratis yang pelaksanaannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma, baik di tingkat cabang maupun di tingkat pusat.

Melalui kegiatan rutinitas dipura maupun kegiatan insidental ditanamkan kepada anggotanya untuk mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Lembaga Parisada pada setiap tingkat terdiri dari Pesamuhan Sulinggih dan Pesamuhan Welaka yang mempunyai tugasnya di bidang masing-masing. Sesuai dengan sifat dan tugasnya, Parisada mempunyai lembaga sosial religius yang proses administrasinya mencerminkan tujuan, organisasi personalia, dan pimpinan. Ketua Parisada dibantu para pengurusnya dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban Parisada tersebut. Tujuan Parisada ini selaras dengan tujuan pemerintah yaitu mencapai kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat Pancasila.



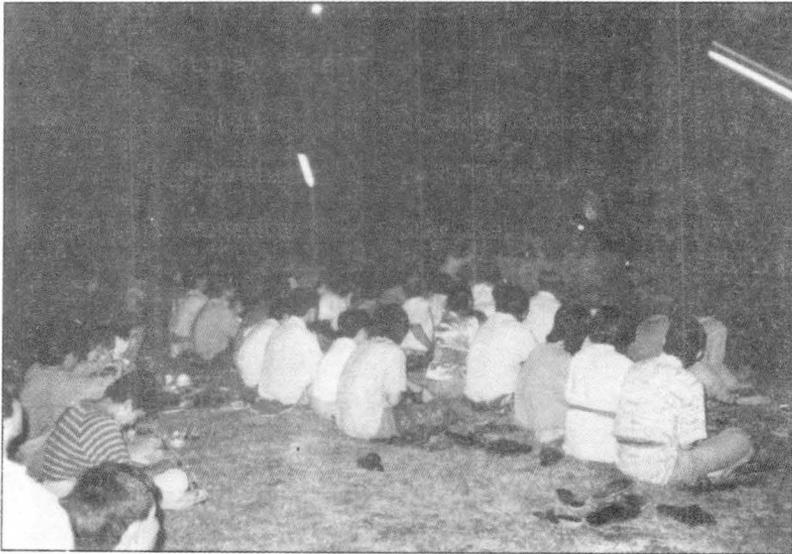
Gambar 1 : Bebantenan atau sesajen yang disiapkan untuk upacara



Gambar 2 : Beberapa pengurus PHDI dalam suatu kegiatan upacara di halaman pura



Gambar 3 : Satu diantara kegiatan bidang kesenian dari sekehe Gong Puspa Giri



Gambar 4 : Kegiatan "mekemit" sebagai media pembinaan sosial religius bagi generasi muda

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN PAGUYUBAN PHDI DENGAN LINGKUNGAN SOSIALNYA**

Setelah pada bab sebelumnya (Bab III) hanya membicarakan paguyuban dan hubungannya ke dalam, maka pada Bab IV ini akan membicarakan hubungan keluar paguyuban PHDI. Bagaimana paguyuban PHDI ini melakukan hubungan dengan lingkungan sosialnya, baik secara individu atau kelompok. Hubungan paguyuban PHDI dengan lingkungan sosialnya, dalam tulisan ini dibatasi empat kelompok. Pertama hubungan paguyuban PHDI dengan paguyuban yang lain di Kotamadya Semarang, kedua dengan masyarakat setempat, ketiga dengan pemerintah daerah setempat, dan keempat dengan pemerintah daerah asal.

Dalam tata pergaulan masyarakat, paguyuban PHDI baik secara individu ataupun kelompok selalu bersinggungan dengan individu atau kelompok yang lain. Oleh karenanya, paguyuban PHDI mau tak mau berhubungan dengan pihak lain, seperti keempat kelompok di atas. Hubungan terjadi bisa secara orang-perorang, orang dengan kelompok atau antar kelompok.

#### **A. Hubungan Paguyuban Parisada Hindu Dharma (PHDI) Dengan Paguyuban Lainnya.**

PHDI merupakan salah satu paguyuban yang cukup besar dan terkenal di Kotamadya Semarang. Apabila dihitung

jumlahnya, paguyuban di Kotamadya Semarang cukup banyak dan tidak mungkin disebut satu persatu. Meskipun termasuk paguyuban besar, tetapi PHDI belum teramsuk daftar paguyuban yang dikeluarkan Pemda setempat. Hal ini tidak menjadi persoala yang berarti baik bagi Pemda sendiri ataupun PHDI. Namun demikian dharma bakti PHDI, baik bagi anggotanya sendiri ataupun masyarakat luas dan pemerintah, cukup banyak baktinya.

PHDI merupakan organisasi sosial yang cukup rapi dalam keanggotaan dan administrasinya. Setiap lima tahun sekali PHDI mengadakan loka saba. Apda tahun 1988, diadakan loka saba V pada tanggal 12 Juli 1988 di Semarang. Selain membicarakan program kerja juga melakukan penyusunan pengurus baru. Periode mendatang ini berlaku antara atau masa bakti 1998-2000. Pengurus PHDI ini tidak hanya di tingkat kodya, tetapi juga sampai tingkat kecamatan.

Kerja sama dengan paguyuban lain biasanya dalam bidang sosial dan atau pendidikan. Bidang sosial ini seperti datang ke panti asuhan-panti asuhan untuk memberikan sumabngan. Dalam kesempatan itu PHDI bersama ormas atau LSM lain bekerja sama untuk menolong sesama. Berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi yang melanda hampir sebagian besar masyarakat, PHDI bekerja sama dengan paguyuban lain atau organisasi sosial lainnya yang ada di kota Semarang. Pada pertengahan Agustus 1988, PHDI bersama Persit (Persatuan Istri Tentara), Dharma Pertiwi, Perwari membagi-bagikan bahan makanan seperti sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat di sekitar Borobudur, Puri Giri Nata dan di Mijen.

Dalam bekerja sama dengan pihak lain PHDI memang jarang bekerja sama dengan paguyuban yang lain. Ada beberapa alasan mengapa PHDI jarang melakukan kerja sama dengan paguyuban yang lain. Pertama, kegiatan PHDI lebih ditekankan pada tujuannya yakni melayani anggota dan masyarakat luas. Kedua, kegiatan PHDI lebih peduli terhadap masyarakat sekitar yang sudah terjadwal dalam program kerja.

Jadi seandainya tidak melakukan kerja sama dengan paguyuban lain bukan berarti tidak mau bersedia bekerja sama.

Selain wujud kerja sama PHDI dengan paguyuban yang lain, seperti di atas ada kerjasama dalam bidang religi dan pendidikan. Akan tetapi, kerja sama dalam bidang ini biasanya terbatas pada yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang agama khususnya agama Hindu. Jadi, hal ini lebih bersifat ke dalam yakni untuk anggota paguyuban yang umumnya atau dapat dikatakan semua beragama Hindu. Sebagaimana tertera dalam tugas dan kewajiban PHDI sebagai majelis tertinggi umat Hindu. Tugas dan kewajiban itu antara lain (a) membina dan mengembangkan kehidupan umat Hindu dibidang keagamaan sesuai dengan swadharmanya masing-masing kepada negara dan bangsa, (b) meningkatkan pengabdian umat Hindu kepada negara dalam lapangan sosial, ekonomi, budaya, dan kenegaraan disamping tugasnya di bidang spritual, dan (c) mengadakan, memelihara, dan mempererat hubungan secara konsultatif dengan setiap orang dan badan yang bergerak di bidang Dharma Agama, Dharma Negara, dan Dharma Kemasyarakatan.

Selain bidang-bidang seperti tersebut di atas, kerjasama PHDI dengan paguyuban-paguyuban lainnya dapat dikatakan tidak ada. Oleh karena kegiatan di luar bidang yang telah disebutkan di atas juga tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang tampak dan mudah diamati kegiatan paguyuban PHDI adalah yang berkaitan dengan agama atau upacara-upacara agama, baik yang rutin atau pun yang insidental.

Jarangnya paguyuban PHDI bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban lainnya terutama disebabkan dalam soal agama, pemeluk agama Hindu di Kotamadya Semarang memang persentasenya kecil. Untuk itu, kegiatan yang berkaitan dengan agama ini biasanya dilakukan sendiri oleh warga paguyuban. Apabila dalam kegiatan keagamaan, PHDI melibatkan pihak lain tentu kurang bijaksana. Apalagi bila pihak lain/paguyuban lain yang berlainan agama, tentu tidak tepat sama sekali. Demikian pula sebaliknya, apabila ada

paguyuban lain mengajak kerja sama dalam bidang agama tentu berpikir panjang untuk menyetujuinya. Karena semua agama tentu mempunyai aqidah yang tidak begitu saja dapat diikuti pemeluk agama lain.

Demikianlah hubungan paguyuban PHDI dengan paguyuban atau organisasi sosial lain yang ada di Kotamadya Semarang. Walaupun tidak terlalu banyak melakukan kerja sama dengan pihak lain, paling tidak PHDI telah melakukan peduli lingkungan seperti telah disebut di atas. Hal ini sesuai dengan program kerja PHDI yang tertuang dalam sasaran keluar seperti menciptakan terwujudnya kerukunan kehidupan umat beragama, meningkatkan peran aktif umat Hindu Dharma dalam mensukseskan pembangunan nasional, dan mensukseskan reformasi serta mendukung kepemimpinan nasional yang mengayomi semua agama.

## **B. Hubungan Paguyuban PHDI Dengan Masyarakat Lokal**

Kiprah paguyuban PHDI bagi masyarakat Semarang cukup baik. Tugas pokok paguyuban PHDI ini terutama terutama memang pembinaan mental spritual bagi anggotanya. Namun demikian bukan berarti tidak peduli pada lingkungannya. Selanjutnya dalam melaksanakan program-programnya, paguyuban PHDI berpedoman melaksanakan yang sudah digariskan. Landasan idiil phdi adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-undang Dasar 1945. Sementara itu landasan operasionalnya berpegang pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PHDI, ketetapan-ketetapan/keputusan Maha Sobha Hindu Dharma Indonesia, keputusan Pesemuan Agung PHDI, dan program kerja serta petunjuk PHDI.

Adapun AD/ART PHDI secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. PHDI berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut ajaran agama Hindu, dan mengantarkan umatnya mencapai kebahagiaan lahir batin. PHDI mempunyai tugas dan kewajiban mengatur, memupuk, memperkembangkan, dan membina umat Hindu, meningkatkan pengabdian kepada

masyarakat dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan kenegaraan disamping tugasnya di bidang spiritual.

PHDI yang berpusat di Denpasar Bali ini membawahi cabang PHDI di berbagai daerah. Di tingkat Kota/kabupaten hanya dibentuk satu badan PHDI. Pengurus PHDI tingkat propinsi untuk tahap awal ditunjuk oleh PHDI Pusat. Selanjutnya, penentuan pengurus ditetapkan oleh Loka Sabha. Apabila PHDI tingkat provinsi, susunan pengurus tingkat kota/kabupaten disahkan oleh PHDI Pusat.

PHDI Pusat yang mengesahkan PHDI setingkat di bawahnya seperti provinsi. Setelah PHDI provinsi terbentuk, pengesahan PHDI kota/kabupaten dilakukan PHDI Pusat dengan lebih dahulu disetujui PHDI Provinsi. Selanjutnya kegiatan pengurus PHDI terbatas di wilayahnya kecuali seizin PHDI setingkat di atasnya. Hal-hal lain yang belum diatur oleh ART PHDI, akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh pengurus PHDI Pusat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada bulan Juli diadakan pemilihan pengurus baru PHDI periode 1998-2000. Dalam pertemuan itu telah ditetapkan program-program PHDI baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan setingkat kabupaten/kota maupun di bawahnya setingkat kecamatan. Dalam membahas program, dibentuklah komisi-komisi demi menjamin kelancaran dan ketertiban. Adapun tugas masing-masing komisi adalah sebagai berikut. Komisi A membahas sebagian rancangan Program Kerja (Bab I dan Bab II). Komisi B membahas sebagian rancangan Program Kerja (Bab III A, B, dan C). Komisi C membahas sebagian rancangan Program Kerja (Bab III D dan E serta Bab IV).

Secara garis besar Program Kerja PHDI Kotamadya Semarang tahun 1998-2000 adalah Bab I Pendahuluan, Bab II Program Umum, Bab III Pokok-Pokok Program dan Bab IV Penutup. Bab II Program Umum terdiri atas A. Pengertian, yakni program kerja merupakan pedoman kerja dan wajib dilaksanakan oleh pengurus PHDI Kotamadya Semarang yang

akan dibantu oleh pengurus tingkat kecamatan serta didukung umat Hindu di Kotamadya Semarang. Selanjutnya, landasan seperti telah disebutkan di atas.

Tujuan Program Kerja PHDI antara lain membina umat Hindu Dharma dalam usaha meningkatkan pelaksanaan swadharma di bidang Dharma Agama dan Dharma Negara; mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga dan memelihara tetap kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia; dan berperan serta secara aktif konstruktif dalam mensukseskan pembangunan nasional. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera lahir dan bathin berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran dalam Program Kerja sebagai berikut. Sasaran ini dikelompokkan menjadi sasaran ke dalam (intern) dan sasaran keluar (ekstern). Sasaran ke dalam meliputi terwujudnya pembinaan terhadap umat Hindu Dharma secara konsepsional, terencana, terarah, terpadu, mantap, dan berkesinambungan dan berkelanjutan; memantapkan keberadaan PHDI sebagai Lembaga Keagamaan Hindu Dharma yang merakyat, tangguh, tanggap, tanggon, terhadap aspirasi umat Hindu Dharma; memantapkan kesadaran dan kemampuan berorganisasi di kalangan umat Hindu terutama para pengurus di semua tingkat wilayah; dan mewujudkan nyatakan pelaksanaan kegiatan di kalangan umat Hindu Dharma.

Sasaran keluar meliputi terwujudnya kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara nyata konsekuen dan konsisten; meningkatkan kemampuan dan peran aktif umat Hindu Dharma dalam peran serta melaksanakan dan mensukseskan pembangunan nasional; dan memnsukseskan reformasi serta mendukung kepemimpinan nasional yang mengayomi semua agama yang secara konsekuen menjalankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan program tentu ada keterbatasan dan tidak mungkin mencakup semua bidang. Oleh karenanya perlu adanya pembatasan-pembatasan yang dijabarkan dalam ruang lingkup. Adapun ruang lingkup itu meliputi penataan, penyempurnaan dan pengembangan organisasi kelembagaan Parisada di semua tingkat di Kotamadya Semarang; pembinaan umat Hindu Dharma di bidang Dharma Agama (ritual/kerohanian) dan di bidang Dharma Negara (pembangunan nasional) serta bidang kesejahteraan (sosial ekonomi).

Dalam kaitannya antara hubungan PHDI dengan masyarakat lokal, program yang sesuai dengan hal ini adalah bidang sosial kemasyarakatan. Ada beberapa butir dalam Program Bidang Sosial Kemasyarakatan PHDI. Program tersebut antara lain mensukseskan program kependudukan dengan meningkatkan partisipasi aktif umat Hindu Dharma dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana; memupuk ketahanan sosial; budaya umat Hindu Dharma sehingga turut serta berperan aktif dalam memangkal merosotnya kualitas seni; meningkatkan kesadaran dan kemampuan umat Hindu Dharma dalam mensukseskan program dan kegiatan bhakti sosial donor darah, bantuan bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup.

Tugas dan kewajiban PHDI selain bidang spiritual juga membina, mengembangkan kehidupan, meningkatkan pengabdian umat Hindu Dharma kepada negara dan bangsa. Bagi umat Hindu, pengabdian dharma agama haruslah seimbang dengan pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Wujud dari pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat, turut berperan dalam kepedulian sosial bagi masyarakat yang tertimpa kesusahan. Pada masa kini sebagian besar masyarakat merasakan imbas dari krisis ekonomi. Demikian juga yang terjadi di Kotamadya Semarang, ada sebagian masyarakat yang memerlukan bantuan pangan. Dengan adanya kondisi seperti ini PHDI Kotamadya Semarang ikut peduli lingkungan dengan membagi-bagikan sembako kepada mereka yang berhak menerimanya. Pembagian

sembako ini dilaksanakan di Pura Giri untuk masyarakat sekitar. Selain itu, pembagian sembako juga dilakukan di daerah Mijen.

Hubungan PHDI dengan masyarakat yang mudah diamati adalah di bidang seni budaya. Dalam kehidupan orang Bali atau umat Hindu selalu terkait dengan ritual agama Hindu. Selanjutnya dalam setiap kegiatan ritual agama Hindu jua tidak lepas dari unsur-unsur seni seperti seni tari. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dimana umat Hindu (Bali) berada pasti berhubungan dengan seni budaya Bali. PHDI Kotamadya Semarang telah memiliki seperangkat gamelan Bali. Dana untuk mendapatkan gamelan ini berasal dari sumbangan Bapak Walikota dan swadaya umat. Manfaat dari gamelan ini dapat digunakan selagi ada perayaan keagamaan yang bisa menambah semarak. Selain itu, seperangkat gamelan ini dapat pula digunakan sebagai sarana latihan untuk meningkatkan ketrampilan. Olah seni gamelan ini sendiri tidak lepas dari seni tari. Oleh karenanya, PHDI Kotamadya Semarang mendirikan perkumpulan yang bergerak di bidang seni (Sheke gong). Latihan seni tari ini dilaksanakan secara rutin. Perkumpulan ini bertanggung jawab kepada PHDI Kotamadya Semarang. Seni tari Bali dalam kenyataannya tidak hanya menarik minat suku bangsa Bali sendiri, tetapi juga suku-suku bangsa lain di luar Bali. Hal ini dapat diamati bahwa tidak sedikit suku bangsa di luar Bali yang menggeluti seni tari Bali. Tidak sedikit guru tari Bali yang anak didiknya tidak hanya dari suku bangsa Bali saja tetapi suku-suku bangsa yang lain. Dengan demikian tari Bali yang selalu banyak pendukungnya ini ikut melestarikan salah satu kasanah budaya yang ada di Indonesia.

Fenomena semacam ini memang dapat ditemui tidak hanya di Semarang, tetapi juga di beberapa tempat. Hampir di setiap padepokan tari yang mengajarkan tari Bali, pesertanya biasanya tidak selalu dari suku bangsa Bali. Tari Bali sudah sangat populer di kalangan masyarakat umum, lebih-lebih di kalangan peminat seni tari. Seni tari tradisional di Indonesia biasanya kostumnya disesuaikan dengan jenis kelamin pembawannya.

Seni tari tradisional di Indonesia kostumnya cukup sopan sesuai dengan adat ketimuran. Demikian pula pada tari Bali cocok dibawakan baik oleh kaum pria maupun kaum wanita.. meski gerak tari Bali cukup dinamis dan atraktif, tetapi setiap gerakannya mengandung seni dan tidak melanggar norma-norma sopan santun. Oleh karenanya, tari Bali banyak digemari oleh anak muda maupun para orang tua. Bahkan tari Bali ini banyak dikagumi bangsa-bangsa dari mancanegara.

Hubungan paguyuban PHDI dengan masyarakat juga terjadi dalam bidang agama (Hindu). PHDI di Kotamadya Semarang sudah berkembang cukup pesat. Seiring dengan berputarnya waktu secara kualitas mengalami banyak perkembangan. Dewasa ini, ternyata warga dari PHDI Kotamadya Semarang tidak hanya suku bangsa Bali saja. Warga PHDI ini tidak sedikit dari suku bangsa di luar Bali. Di luar suku bangsa Bali, suku bangsa lainnya yang menjadi warga PHDI adalah Jawa. Sesuai dimana domisili PHDI berada di tengah komunitas suku bangsa Jawa.

Masuknya suku bangsa Jawa menjadi warga PHDI biasanya melalui perkawinan. Oleh karena suku bangsa Bali yang ada di Kotamadya Semarang ini keberadaannya sudah cukup lama, maka dapat dikatakan di antara keduanya tidak ada jarak yang cukup berarti. Orang Jawa yang kawin dengan suku bangsa Bali bisa di pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Di antara keduanya, suku bangsa Jawa dan suku bangsa Bali, sudah cukup lama bergaul dan bersinggungan, maka tidak pula mengherankan apabila ada di antaranya yang kemudian menyatu dalam wujud perkawinan. Bisa saja menyatunya kedua belah pihak ini mungkin adanya faktor kesamaan. Sementara suku bangsa Jawa masih ada yang memegang kepercayaan Jawa kunonya. Kepercayaan Jawa kuno atau disebut "kejawen" masih ada "bau" peninggalan agama Hindu seperti misalnya sesajen. Orang Jawa yang masih memegang adat lamanya ini tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi, bersikap, membaur terhadap orang Bali yang beragama Hindu tadi. Apabila yang mengalami kontak dan keduanya saling tertarik (cinta), maka akhirnya akan membuahkan perkawinan.

Selain hal di atas perkawinan bisa juga terjadi memang kedua belah pihak sudah beragama yang sama, agama Hindu, walau sukunya berbeda. Misalnya, suku bangsa Jawa yang orang tuanya sudah memeluk agama Hindu. Kemudian kawin dengan suku bangsa Bali. Jadi, perkawinan ini berlangsung dari awalnya memang sudah satu agama.

Denngan semakin berkembang kehidupan warga ini, mau tidak mau pihak PHDI mengadakan sarana untuk keperluan ibadah baik untuk anggotanya sendiri maupun warga lain yang membutuhkannya. PHDI Kotamadya Semarang ini juga mewadahi umat Hindu dari suku bangsa yang lain. Seperti sudah kita ketahui pemeluk agama Hindu di Indonesia umumnya dan khususnya di Semarang, tidak hanya dari suku bangsa Bali, tetapi juga suku bangsa lainnya seperti Jawa dan India. Dengan demikian PHDI ini selalu menyediakan fasilitas peribadatan bagi siapa saja yang seiman.

### **C. Hubungan Paguyuban PHDI Dengan Pemerintah Daerah Setempat**

Hubungan paguyuban PHDI dengan Pemda setempat cukup erat. Pada kepengurusan periode 1989-1998, personalianya dapat dikatakan 95% terdiri atas pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan Polri. Dengan statusnya seperti ini, masing-masing individu pengurus seakan mempunyai peran ganda yang kedua-duanya merupakan tugas mulia. Di satu sisi sebagai abdi negara, pengurus harus menunaikan tugas-tugas yang bertalian dengan negara. Sementara itu di sisi lain, sebagai pengurus PHDI selain mengabdikan kepada agama juga melayani kepentingan umat.

Oleh karena sebagian besar (95%) pengurus adalah sebagai abdi negara, bisa dibayangkan waktu yang tersisa mereka untuk berkiprah di organisasi seperti PHDI tentu sangat terbatas. Tugas utama mereka adalah menunaikan kewajibannya sebagai abdi negara. Dengan fakta seperti ini dan demi kelancaran roda organisasi, maka jalan keluar yang diambil PHDI Kotamadya Semarang dibagi menjadi empat Banjar (tempek). Keempat

banjar itu sebagai berikut : Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat, dan satu wilayah ada di kecamatan Mijen. Masing-masing banjar ini dipimpin oleh ketua tempek. Tugas ketua tempek adalah membina umat, menghimpun kegiatan sosial, keagamaan, dan demi kelancaran kegiatan banjar (tempek) serta menunjang sumber dana PHDI Kotamadya Semarang.

Hubungan PHDI dengan Pemda setempat berdasarkan pada salah satu program bidang organisasi yang tercantum pada Bab Pokok-Pokok Program PHDI. Salah satu program bidang organisasi itu antara lain memupuk dan meningkatkan komunikasi, koordinasi yang baik antara Parisada tingkat kodya dengan Parisada tingkat kecamatan, antara Parisada dengan yayasan/lembaga/organisasi yang dimiliki oleh umat Hindu, serta antar Parisada dengan pemerintah.

Dalam pembinaan dan pengembangan umat, PHDI bekerja sama dengan Pembina Mental (Bintal) Daerah Militer (Dam) IV Diponegoro, untuk meningkatkan ibadahnya. Kerja sama ini dilakukan biasanya dalam rangka persembahyangan baik pada hari-hari raya maupun persembahyangan purnama dan tilem. Hal ini dilaksanakan untuk lebih mempertebal dan berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi. Pembinaan umat Hindu di Kotamadya Semarang tidak dengan berfungsinya pendidikan yang telah dirintis oleh sesepuh umat Hindu. Selain itu terlaksanannya pendidikan tidak pula dari jasa baik anggota-anggota PHDI yang bekerja di Dinar Bintak Kodam IV Diponegoro. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh orang tua/umat Hindu di Kotamadya Semarang.

Dalam bidang pendidikan, PHDI bekerja sama dengan Dinas Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama (Depag) dan Dinas Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Kotamadya Semarang. Program kerja sama itu berisi pelaksanaan dan penertiban sistem pendidikan agama Hindu mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Masih berkaitan dengan Depdikbud,

melalui Dinas Purbakala, PHDI Kotamadya Semarang mendukung usulan PHDI Pusat untuk dapat memprioritas pengangkatan dan penempatan petugas penjaga/pemelihara candi-candi. Dengan diangkatnya menjadi pegawai negeri, kesejahteraan petugas ini akan terangkat dan pengabdianya akan semakin besar dalam menjalankan tugasnya. Pada gilirannya, candi-candi sebagai warisan leluhur akan terpelihara sebagaimana mestinya dan terjaga kesuciannya. Dengan demikian umat Hindu yang akan bersembahyang ke candi-candi itu akan lebih tenang.

Dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui Kantor Gubernur Daerah Tingkat I, PHDI mengajukan usul kepada pemerintah agar petugas pembantu pencatat perkawinan sipil menurut agama Hindu menjadi pegawai negeri sipil. Selama ini, petugas tersebut bekerja hanya atas dasar surat keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah (KDH) Tingkat I Jawa Tengah, PHDI berharap agar petugas tersebut diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Kantor Pencatatan Sipil setempat. Dengan diangkatnya menjadi pegawai negeri, petugas tersebut mempunyai status dan penghasilan tetap. Dengan demikian, yang bersangkutan akan lebih giat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seandainya sebelum diangkat kurang rajin, setelah diangkat menjadi lebih rajin bekerja.

PHDI pun tanggap akan situasi sosial di negara kita khususnya masalah sosial ekonomi masyarakat di Semarang. Hampir di semua tempat di daerah perkotaan angka pengangguran terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah tidak seimbangnya lonjakan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan. Dalam rangka turut serta menanggulangi/mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur, PHDI bekerja sama dengan instansi terkait. Instansi terkait yang diajak bekerja sama antara lain Kanwil Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), yayasan-yayasan milik negara di bawah Departemen Sosial (Depsos), dan yayasan-yayasan yang ada di PHDI sendiri. Kerja sama ini merupakan pendidikan dan

latihan (Diklat) untuk meningkatkan keterampilan terhadap anak-anak/generasi muda Hindu dan generasi muda lainnya. Diharapkan, dengan dilatih dan dididik keterampilan ini, generasi muda ini mempunyai bekal untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dalam meningkatkan keimanan umat, perlu sarana yang memadai. Oleh karenanya PHDI perlu mengadakan atau membangun sarana peribadatan bagi umatnya. Hanya saja, PHDI tidak mampu menanggung sendiri dalam hal dana. Dalam hal ini perlu upaya penggalangan dana. Upaya telah dilakukan dengan menghimpun dana dari kerelaan umat Hindu. Inipun belum mencukupi untuk mewujudkan harapan itu. Dengan demikian perlu kerja sama dengan pihak lain agar dapat bantuan dana. PHDI juga telah melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, Pemda Jawa Tengah, Pemda Kotamadya Semarang, dan pihak lain yang ikut memajukan umat Hindu, khususnya di Kotamadya Semarang.

Dalam membangun Pura Giri Nata, PHDI menjalin hubungan dengan pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres), Pemda Tk.I Jawa Tengah, Pemda Tk. I Bali, Pemda Tk.II Kotamadya Semarang. Jaringan hubungan kerja sama itu menghasilkan dana untuk pembangunan pura tersebut. Keinginan umat Hindu agar Pura Giri Natha menjadi pura yang fundamental karena bahan-bahan bangunan seperti batu diambil dari wilayah Jawa Tengah, tidak dari luar.

Di lingkungan Akademi Kepolisian (Akp), PHDI juga mendirikan pura dengan seizin pihak Akp. Pura Akp mendapat bantuan pemerintah lewat Gubernur Akp. Pura Akp ini diperuntukkan bagi umat Hindu yang tinggal di kompleks Akp dan masyarakat sekitar yang membutuhkannya.

Pura Amentasari mendapat bantuan yang cukup berarti dari Bapak Walikota Madya Semarang. Walikota ini selain menyumbang dana (uang) juga menyediakan tempat (tanah) dimana pura itu dibangun. Selain itu dana juga dihimpun dari

umat dan donatur-donatur. Dengan selesainya pura ini, diharapkan adanya tempat ibadah yang dapat dijangkau umat dengan mudah. Pura Amertasari ini berlokasi di Perumnas Tlogosari.

Demikian pihak PHDI telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi. Semua ini dimaksudkan untuk memajukan umat Hindu, khususnya yang tinggal di lingkungan Kotamadya Semarang. Jalinan kerja sama itu tidak hanya dapat dinikmati khusus bagi umat Hindu saja, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam hal kematian pun, PHDI menjalin kerja sama dengan pihak lain yakni pengelola krematorium milik Pemda. Pengguna jasa krematorium biasanya selain umat Hindu juga pihak lain seperti etnik Cina. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dengan menggunakan peralatan modern.

Prosesi pembakaran mayat dilaksanakan tidak seperti di daerah asal, Bali. Pelaksanaannya telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan lingkungan setempat. Suku bangsa Bali yang tinggal di Semarang berada di tengah komunitas suku-suku bangsa yang lain seperti Jawa. Dalam prosesi penguburan tidak mungkin dilakukan arak-arakan. Arak-arakan ini bila dilaksanakan mungkin bisa mengganggu kelancaran lalu lintas. Apalagi bila jarak antar rumah orang yang meninggal dengan tempat mengkremasi cukup jauh. Selain tidak efektif juga membutuhkan banyak waktu dan juga mungkin biaya. Yang meninggal biasanya hanya ditempatkan dalam peti dengan pengiring secukupnya dan tidak dilakukan arak-arakan seperti di Bali.

Demikianlah jalinan hubungan antara PHDI dengan pihak Pemda setempat. Dalam hal pendidikan dan kebudayaan, PHDI bekerja sama dengan Depdikbud. Masih dalam bidang pendidikan, PHDI juga bekerja sama dengan Depag, Semarang. Selain itu juga dengan Kodam IV Diponegoro terutama dalam hal petugas bimbingan mental (Bintal). Dalam bidang sosial, PHDI berhubungan dengan Depsos dan Depnaker terutama

dalam menyongsong dunia kerja. Demikian juga dengan Depdagri PHDI bekerja sama dalam hal pengusulan pengangkatan pegawai negeri.

Selain itu, masih ada hubungan kerja sama dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan program kerja PHDI. Pokok-pokok program kerja itu menyangkut bidang-bidang organisasi, keagamaan dan pembinaan umta, pendidikan sosial kemasyarakatan, dan usaha penghimpunan dana. Dalam memajukan umatnya dan dalam rangka peran serta pembangunan nasional, PHDI tentu tidak mungkin bekerja sendirian. PHDI perlu jalinan kerja sama dengan pihak lain seperti telah diutarakan di atas.

#### **D. Hubungan Paguyuban PHDI Dengan Pemda Asal (Provinsi Bali)**

Paguyuban Parisada Hindu Dharma Indonesia pusatnya berada di Denpasar, Bali. Organisasi atau paguyuban ini termasuk besar karena mempunyai cabang di beberapa daerah. Cabang di bawah pusat biasanya wilayah provinsi. Kemudian cabang setingkat provinsi ini membawahi beberapa wilayah setingkat daerah tingkat dua seperti kodya atau kabupaten. Misalnya, cabang PHDI Provinsi Jawa Tengah membawahi wilayah-wilayah seperti kabupaten-kabupaten Boyolali, Purwodadi, Tegal, Cilacap, Klaten, Semarang, dan Kodya Semarang. Wilayah PHDI setingkat daerah tingkat dua ini, membawahi wilayah setingkat kecamatan atau disebut banjar (tempek). Seperti telah dikemukakan di atas, PHDI Kotamadya Semarang membawahi empat wilayah atau banjar (tempek) seperti Semarang barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, dan Mijen.

Hubungan PHDI Kotamadya Semarang dengan Pemda asal (Bali) tidak terlepas dari PHDI Pusat Denpasar. Mengapa bisa demikian? Provinsi Bali mayoritas penduduknya bersuku bangsa Bali. Penduduk yang bukan suku bangsa Bali biasanya pendatang. Dapat dikatakan bahwa penduduk bersuku bangsa

Bali ini semuanya beragama Hindu. Di samping itu, PHDI adalah og yang berdasar pada agama (Hindu). Di beberapa kota besar, penduduk pendatang biasanya tidak lepas begitu saja dengan daerah asal. Kontak-kontak antara pendatang di satu tempat dengan daerah asalnya terjadi tidak hanya secara perorangan, tetapi bisa terjadi antara organisasi sosial seperti paguyuban dengan pemerintah daerah asal. Demikian pula PHDI Kotamadya Semarang dengan PHDI Pusat (Denpasar) tidak hanya antar organisasi itu, tetapi seringkali juga melibatkan Pemda.

Salah satu hubungan yang dilakukan antara PHDI Kotamadya Semarang dengan PHDI pusat adalah bidang keorganisasian. Biasanya PHDI cabang akan selalu berkonsultasi dengan PHDI Pusat. Selanjutnya perlu sedikit gambaran bagaimana struktur organisasi PHDI mulai dari pusat hingga ke cabang-cabang dan di bawahnya. PHDI Pusat untuk tingkat nasional dan PHDI daerah untuk tingkat provinsi, kodya/kabupaten, kecamatan serta banjar atau wilayah-wilayah yang disamakan dengan itu. Sebagai ibukota negara, PHDI Pusat mengangkat perwakilan di Jakarta. Selain itu, perwakilan ini bisa di daerah-daerah tertentu apabila dipandang perlu.

Garis besar struktir organisasi PHDI adalah sebagai berikut. PHDI Pusat dipimpin pengurus yang terdiri atas Ketua Paruman Sulinggih dan Ketua Paruman Welaka serta Sekretaris yang dipilih anggota Paruman. Paruman Sulinggih menangani masalah berkaitan dengan keagamaan, sedangkan paruman Welaka berkaitan dengan urusan kemasyarakatan. Selengkapnya, Ketua Umum dijabat Ketua Paruman Sulinggih, Ketua I dijabat Ketua Paruman Welaka, Ketua II dijabat Wakil Ketua Paruman Welaka. Selanjutnya, pengurus PHDI Pusat dipilih oleh Mahasabha dan menjabat selama empat tahun, sedangkan PHDI Daerah dipilih oleh Loka Sabha dan menjabat selama 3 tahun.

Hubungan PHDI Cabang dengan PHDI Pusat berkaitan dengan pengangkatan/ pemilihan pengurus. Selain itu, PHDI Cabang dalam hal ini Kotamadya Semarang juga akan

berkonsultasi dan berkoordinasi apabila akan mengadakan Loka Sabha. Loka Sabha dalam hal ini setingkat musyawarah daerah (Musda) selanjutnya dalam hal dana, biasanya PHDI yang akan menyelenggarakan Loka Sabha juga berasal dari umat, donatur, juga dari bantuan Pemda asal (Provinsi Bali).

Hubungan dengan Pemda asal (provinsi Bali) biasanya juga dilakukan PHDI Kotamadya Semarang dalam bantuan dana. Misalnya, dalam rangka pembangunan Pura Giri Natha di Semarang, PHDI Kotamadya Semarang mendapat bantuan dari Pemda Bali. Hal ini bisa terjadi karena antar PHDI Pusat (Pemda asal) dengan PHDI Cabang (Semarang) ada jalinan ikatan moral yang kuat. PHDI Pusat berupaya selalu meningkatkan pengabdian umat Hindu kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Untuk hal itu, PHDI Pusat dalam hal ini terkait pula Pemda asal, selalu mengadakan kontak atau komunikasi dengan cabang-cabangnya atau sebaliknya.

Dalam hal pendidikan, PHDI Kotamadya Semarang juga berkewajiban meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini putra-putri dari umat Hindu. PHDI mengadakan program bea siswa bagi generasi muda umat Hindu. Bea siswa ini diperuntukkan bagi putra-putri baik yang akan menuntut ilmu di bidang umum maupun yang ingin memperdalam agamanya (Hindu). Yang mendapat bea siswa ini baik untuk jenjang pendidikan menengah ataupun perguruan tinggi.

Demikianlah kiprah paguyuban PHDI lingkungan sosialnya. Hubungan atau kerja sama yang dilakukan mencakup masyarakat di sekitar keberadaan/domisili paguyuban PHDI. Kerja sama juga dilakukan PHDI dengan paguyuban lain atau kelompok/organisasi masyarakat yang ada di Kotamadya Semarang. Selain itu, PHDI juga menjalin kerja sama baik dengan Pemda setempat atau Pemda asal suku bangsa Bali. Jadi, PHDI Kotamadya Semarang, meski secara fisik cukup jauh dengan PHDI Pusat, tetapi dalam keorganisasian, kepengurusan, dan hal-hal urusan umat selalu “dekat”.

## **BAB V**

### **ANALISIS**

Semarang merupakan lingkungan budaya perkotaan. Lingkungan budaya perkotaan ini dapat dikatakan sebagai permukiman. Permukiman merupakan ajang atau wadah tempat penduduk melakukan aktivitas dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kehidupannya. Dalam kesatuan wilayah pemukiman, penduduk mengembangkan pola adaptasi yang mengacu pada sistem nilai dan sistem budaya tertentu. Dengan demikian, mereka membentuk suatu lingkungan budaya yang berbeda dengan lingkungan budaya lain (Dr. S. Budhisantoso). Dalam hal ini Semarang berbeda dengan lingkungan budaya yang lain, seperti pedesaan misalnya.

Sebagaimana kota-kota besar lainnya, Semarang merupakan tujuan atau tumpuan harapan penduduk sekitar bahkan dari berbagai daerah di Indonesia, untuk meningkatkan taraf hidupnya. Peningkatan taraf hidup ini dapat berupa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mencari pekerjaan atau mutasi kedinasan dari instansi (pemerintah/ perusahaan swasta). Migrasi penduduk seperti ini lebih lazim disebut urbanisasi. Dengan asal informasi dari berbagai daerah, dengan sendirinya penduduk kota Semarang terdiri atas beragam suku bangsa.

Dengan beragamnya suku bangsa ini, maka terjadilah hubunagn antarbudaya. Hubungan antarbudaya adalah proses

interaksi yang kompleks akibat adanya kontak-kontak antarkelompok etnik (suku bangsa) yang terkait (Mc. Suprpti, 1998/1999). Wujud dari kontak-kontak antarsuku bangsa ini dapat berupa kerjasama, persaingan bahkan konflik. Oleh karenanya dalam analisis ini akan diuraikan bagaimana kekuatan sentripetal atau faktor-faktor yang mendorong intergrasi di antara kelompok-kelompok etnik/ kedaerahan yang bersinggungan dan leluatan sentrifugal atau faktor-faktor atau potensi yang mendorong disintegrasi.

#### **A. Kekuatan Sentripetal (Mengikat)**

Suku bangsa Bali sudah bermukim cukup lama di Kotamadya Semarang. Hampir dapat dikatakan sudah lebih dari satu generasi. Dengan relatif cukup lama, suku bangsa Bali ini sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial, kehadiran suku bangsa Bali ini tampak dapat diterima suku bangsa lokal dalam hal ini suku bangsa Jawa.

Secara garis besar, antara suku bangsa Bali dan suku bangsa Jawa berbeda dalam hal agama, tetapi ada pula sisi-sisi kesamaan. Secara historis kedua suku bangsa pernah mempunyai tradisi sama yakni kepercayaan atau tradisi lama peninggalan agama Hindu. Hanya saja suku bangsa Bali tidak menungggalkan tradisi lama. Atau lebih tepat, suku bangsa Bali telah memeluk agama Hindu, sementara itu suku bangsa Jawa sudah banyak meninggalkan tradisi lama kemudian memeluk agama lain seperti Islam dan Kristen. Namun demikian tidak seluruhnya atau ada sementara suku bangsa Jawa yang masih mempertahankan tradisi lama walupun tidak memeluk agama Hindu.

Pada awalnya, paguyuban yang mewadahi suku bangsa Bali di perantauan (Semarang) bernama Ikatan Keluarga Indonesia Bali atau disingkat "IKIB". IKIB ini memang hanya mewadahi anggota yang berasal dari Bali. Tentu saja orang lain yang bukan dari Bali tidak bisa masuk menjadi anggota. IKIB ini hanya terbatas pada kesukuan dan kedaerahan yakni Bali.

Pada perkembangan selanjutnya, suku bangsa Bali mulai membaaur dengan suku bangsa lokal. Pembauran dalam hal ini adalah soal kawin-mawin. Tidak sedikit suku bangsa Bali kawin dengan suku bangsa Jawa dan sebaliknya. Dalam pergaulan di antara anggota paguyuban IKIB, suami/istri orang Bali tentu tidak merasa “pas” di tengah-tengah suku bangsa Bali. Misalnya suami yang suku bangsa Jawa tentu merasa canggung bergaul di tengah-tengah suku bangsa Bali atau sebaliknya. Perbedaan latar belakang (daerah dan atau suku bangsa) inilah yang membuat canggung, walaupun suku bangsa Jawa itu sudah masuk agama Hindu.

Dalam perjalanan paguyuban IKIB ini, banyak masalah atau hal-hal yang perlu dicari jalan keluarnya demi kepentingan para anggotanya. Dalam kenyataannya, anggota paguyuban itu biasanya tidak terbatas pada kepala keluarga (suami/istri), tetapi juga anggota keluarganya. Dalam kinerja paguyuban biasanya ada juga kegiatan yang mewadahi para ibu-ibu/istri dan generasi mudanya. Oleh karena salah satu hal seperti di atas, paguyuban IKIB ini pun berubah. Paguyuban ini terletak pada dasar pengikatnya. Pengikat paguyuban yang baru ini tidak atas dasar kesukuan atau kedaerahan, tetapi agama. paguyuban baru yang bernama PHDI telah “mengglobal”. Dalam arti, anggota PHDI ini tidak terbatas pada suku bangsa atau dari daerah Bali saja. Anggota PHDI ini terbuka bagi siapa saja yang beragama Hindu. Dasar dari paguyuban PHDI ini adalah agama Hindu.

Anggota PHDI dewasa ini hanya suku bangsa Bali, tetapi tidak sedikit suku bangsa Jawa yang menjadi anggota. Oleh karena dasar dari paguyuban PHDI ini agama, maka anggotanyapun tentu beragama Hindu meskipun bersuku bangsa Jawa. Dengan demikian paguyuban PHDI ini terbuka bagi siapa saja asalkan beragama Hindu. Orang Jawa yang masuk ke paguyuban PHDI ini tidak hanya sekedar sebagai anggota, tetapi ada pula yang terlibat menjadi pengurus. Selanjutnya, ada pula suku bangsa di laur Bali atau orang Jawa sudah terlibat lebih jauh dalam kepengurusan. Bahkan tidak

hanya itu saja, suku bangsa Jawa ini berperan serta dalam membina dan meningkatkan kehidupan rohani umat Hindu. Suku bangsa Jawa ini selain menjadi pengurus juga telah menjadi pendeta.

Dalam kepengurusan Paruman Sulinggih, biasanya dijabat oleh pendeta-pendeta. Demikian pula yang terjadi pada kepengurusan PHDI masa bakti 1998-2003, ada satu pengurus yang bersuku bangsa Jawa. Pada kepengurusan Paruman Welaka, salah satu pengurusnya adalah bersuku bangsa Jawa. Meskipun dalam proses pencarian data lapangan tidak menjumpai langsung pengurus yang bersuku bangsa Jawa, tetapi dalam daftar nama pengurus (lampiran) dapat dipastikan bahwa nama yang tercantum itu pemilikinya adalah bersuku bangsa Jawa. Dalam kehidupan paguyuban ini, dapat dikatakan bahwa suku bangsa Bali bersikap menerima kehadiran orang luar baik sebagai anggota ataupun sebagai pengurus.

Faktor agama merupakan pengikat yang kuat dalam pergaulan antar anggota paguyuban PHDI. Hal ini tampak dalam kegiatan-kegiatan upacara yang berkenaan dengan agama Hindu. Dalam kegiatan itu, mereka, suku bangsa Bali dan suku bangsa Jawa, tampak telah menyatu. Diantara mereka sulit dibedakan mana yang bersuku bangsa Bali dan mana yang bersuku bangsa Jawa. Perbedaan ini baru dapat ditengarai bila sudah didekati dan bercakap-cakap dengan yang bersangkutan. Dengan bahasa ini baru dapat dibedakan siapa yang kita ajak bicara, apa suku bangsa Bali atau suku bangsa Jawa.

Dalam hal bahasa, kedua suku bangsa yang terwadahi paguyuban PHDI bisa saling menerima. Suku bangsa Bali banyak yang sudah biasa berbahasa Jawa. Hal ini dapat dimaklumi karena suku bangsa Bali dalam kehidupan sehari-harinya selalu bersinggungan dengan suku bangsa Jawa. "Ala bisa karena biasa", begitulah bunyi pepatah. Demikian pula yang terjadi pada suku bangsa Bali yang telah menjadi anggota tidak sedikit yang mengerti bahasa Bali. Terutama suku bangsa Jawa yang beragama Hindu dengan sendirinya mengerti bahasa

Bali walaupun tidak banyak. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak istilah-istilah agama yang menggunakan bahasa Bali. Setidak-tidaknya, yang bersangkutan berusaha mengerti istilah-istilah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, tentu ada pula suku bangsa Jawa yang mengerti bahasa Bali yang tidak hanya sekedar istilah-istilah agama saja.

Selain agama, faktor bahasa juga menjadi pengikat di antara anggota paguyuban PHDI, baik antarsesama suku bangsa Bali, antar sesama suku bangsa Jawa atau antar suku bangsa Bali dan suku bangsa Jawa. Bahasa yang digunakan pengantar pergaulan di antara anggota paguyuban ini adalah Indonesia, Jawa dan Bali. Bahasa Indonesia biasanya digunakan apabila kedua belah pihak (suku bangsa Bali dan suku bangsa Jawa) tidak memahami bahasa lawan bicara. Bahasa Jawa dan bahasa Bali biasanya digunakan di kalangan pendukungnya masing-masing. Namun demikian adakalanya, misalnya, ada suku bangsa Bali, di tengah komunitas suku bangsa Jawa, yang menggunakan bahasa Jawa.

Masyarakat Kotamadya Semarang cukup menerima kehadiran paguyuban PHDI. Dapat dikatakan bahwa sementara kehadiran PHDI di tengah masyarakat Semarang belum pernah terjadi konflik antara anggota PHDI dengan masyarakat. Anggota PHDI baik yang dari suku bangsa Jawa ataupun dari suku bangsa Bali hidup berdampingan sebagaimana mestinya dengan masyarakat yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada anggota PHDI yang menonjolkan identitas dirinya (sebagai anggota PHDI). Pada arena sosial tertentu, secara fisik, keberadaan para anggota PHDI tidak dapat ditengarai. Sebagaimana disebutkan di atas, anggota PHDI yang bersuku bangsa Bali dapat ditengarai dari dekat apabila kita sudah bercakap-cakap. Hal ini karena ada logat yang spesifik yang membedakan dengan yang lain.

Kehadiran paguyuban PHDI di kota Semarang paling tidak bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat di sekitar tempat kegiatannya. Kegiatan PHDI tidak hanya kedalam, tetapi juga keluar sebagaimana dharma baktinya kepada masyarakat,

bangsa, dan negara. Dengan demikian, paguyuban PHDI tidak bersifat eksklusive, tetapi inklusive. Tidak jarang kegiatan PHDI tidak hanya dirasakan atau dimanfaatkan bagi anggotanya, tetapi juga masyarakat luas tanpa pamrih tertentu.

## **B. Kekuatan Sentrifugal (Memecah Belah)**

Pada umumnya kita-kota besar di Indonesia termasuk kota Semarang, penduduknya beragam suku bangsa dan atau asal daerah. Sebagaimana telah disebut di depan, kota Semarang terdiri atas beragam suku bangsa. Masing-masing suku bangsa tentu masih membawa adat istiadat atau tradisi dari daerahnya. Meskipun sudah lama berada di Semarang apalagi yang baru tinggal, tentu tidak bisa begitu saja melepas begitu saja budayanya yang sudah turun temurun. Di tempat yang baru (Semarang) suatu suku bangsa ada kecenderungan untuk mengembangkan, melestarikan atau paling tidak tetap menjalankan tradisi lamanya seperti bahasa.

Masing-masing suku ada kecenderungan, baik langsung atau tidak langsung, ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah suku bangsa lainnya. Agar tetap eksis, biasanya suatu suku bangsa akan berusaha “menonjolkan” jatidirinya. Suku bangsa ini akan mengenalkan apa yang ia punya kepada orang lain. “Penonjolan” atau pengenalan jati diri ini dapat berupa hal-hal yang mudah dilihat semua orang. Hal yang dapat dilihat ini seperti upacara-upacara tradisional apalagi dengan pengerahan massa. Seperti pada suku bangsa Bali, pada saat upacara kematian atau upacara lainnya yang melibatkan banyak orang. Dengan perilaku suatu suku bangsa seperti di atas, paling tidak suku bangsa yang lain akan mengenal keberadaan suku bangsa tersebut.

Munculnya kelompok-kelompok biasanya karena adanya kepentingan bersama. Munculnya kepentingan ini bisa atas dasar kesukubangsaan, kedaerahan, dan hobi/profesi. Dewasa ini sudah menjadi gejala umum bahwa pada masyarakat di perkotaan banyak muncul kelompok-kelompok atas dasar seperti di atas. Masing-masing kelompok biasanya akan

mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Di kota Semarang sendiri, jumlah paguyuban yang terdaftar di Pemda ada puluhan. Belum lagi, kelompok-kelompok lainnya seperti lazimnya pada masyarakat perkotaan. Melihat gejala seperti ini tampak masyarakat perkotaan terkotak-kotak.

Pengelompokkan/pengkotakkan atau pemisahan dalam masyarakat perkotaan tidak hanya atas dasar seperti di atas yang dapat dikategorikan nonfisik, tetapi juga secara fisik. Dalam satu ruang perkotaan, biasanya ada segregasi keruangan. Segregasi atau pemisahan itu berdasar pada kesukubangsaan, sosial, kegiatan ekonomi. Misalnya ada wilayah kaum Cina (Pecinan), Arab, Jawa; kaum elite, kompleks pegawai/karyawan tertentu, kaum gelandangan, pertokoan/pusat kegiatan ekonomi, hiburan, dan olah raga. Meskipun ada pemisahan ini bukan berarti di antara mereka tidak bersinggungan atau berkomunikasi. Dalam keseharian, di antara kelompok masyarakat tertentu berinteraksi. Dalam berinteraksi tentu banyak terjadi kemungkinan. Apabila kedua belah pihak saling memahami, maka proses integrasi akan berjalan lancar. Sebaliknya, apabila kedua belah pihak saling berprasangka, maka akan bisa terjadi kesalahpahaman.

Selain pengelompokkan masyarakat seperti di atas, ada pula pengelompokkan masyarakat atas dasar agama, seperti paguyuban PHDI. Agama merupakan hak asasi bagi seseorang. Oleh karenanya masing-masing antar umat beragama hendaknya saling menghormati hak asasi itu, dalam pergaulan masyarakat, seringkali agama menjadi masalah yang sensitif. Dalam hal ini diperlukan kesediaan kedua belah pihak untuk saling tenggang rasa. Seperti misalnya antar pemeluk agama Hindu (anggota PHDI) dengan pemeluk agama Islam harus mentaati kaidah masing-masing. Kaidah antar kedua agama ini memang berbeda.

Perbedaan adalah fakta nyata yang ada pada negara ini. Oleh karenanya perbedaan itu tidak dapat ditiadakan. Perbedaan, baik suku bangsa, agama, kelompok, golongan, status sosial-ekonomi merupakan kenyataan yang mesti

kita hadapi sehari-hari. Terlalu gampang kita untuk mempertentangkan perbedaan itu. Memang kemajemukan masyarakat kita berpotensi munculnya konflik. Seperti halnya Kota Semarang yang cukup majemuk. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan kesediaan masing-masing warga masyarakat. Kesediaan yang bagaimana? Ya, paling tidak masing-masing individu bersedia menerima perbedaan itu, bersedia untuk bertenggang rasa, bersedia saling memahami latar belakang budaya, adat kebiasaan dan kesediaan berkorban untuk orang lain.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Kota Semarang terletak di pinggir pantai. Oleh karena letaknya di pinggir pantai, Semarang mempunyai pelabuhan Tanjung Emas. Selain itu, Semarang berada di antara perlintasan kota-kota besar di Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya. Kota Semarang tidak sulit dijangkau baik melalui udara, laut, ataupun darat. Lewat darat dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor (mobil) ataupun KA. KA jurusan Jakarta-Surabaya dan sebaliknya tentu akan melewati Semarang. Demikian pula mobil penumpang (bus umum) baik yang tujuan Semarang atau tempat-tempat lain tidak sedikit yang singgah atau melintasi kota ini.

Seperti telah diuraikan di bagian atas, Kota Semarang merupakan tumpuan penduduk sekitar, juga berbagai daerah sekitar. Banyaknya penduduk yang bermigrasi ini selain daya tarik Kota Semarang dan atau daya dorong dari daerah asal juga mudahnya transportasi. Banyaknya penduduk yang bermigrasi/urbanisasi telah menjadi Kota Semarang penduduknya banyak sebagai perantau. Hidup dalam perantauan tentu yang bersangkutan butuh teman. Ada kecenderungan dari perantau ini mencari teman dari orang-orang sedaerah asal atau sesuku bangsanya.

Kebutuhan akan rasa senasib sepenanggungan dan rasa aman terwujudlah wadah orang-orang sedaerah asal. Mereka

kemudian bersatu dan muncullah kelompok-kelompok kekerabatan, kedaerahan, dan kesukubangsaan. Kelompok-kelompok inilah apa yang disebut kemudian dengan paguyuban. Salah satu paguyuban itu adalah PHDI.

Keberadaan paguyuban-paguyuban ini juga sebagai salah satu sarana pengenalan budaya. Paguyuban baik kedaerahan atau kesukubangsaan ini dalam kiprahnya di tengah kehidupan masyarakat tidak sedikit masih membawa warna kedaerahan/kesukubangsaan. Seperti halnya paguyuban PHDI masih kental warna kedaerahan Bali. Bali identik dengan agama Hindu. Adat dan agama seakan telah menyatu bagi suku bangsa Bali. Tidak heran apabila dalam kiprahnya di masyarakat muncul warna Bali atau agama Hindu. Apalagi memang PHDI adalah paguyuban berdasar pada agama Hindu. Demikian pula paguyuban-paguyuban yang lain. Setidak-tidaknya paguyuban ini merupakan “jendela” untuk melihat budaya yang diusung paguyuban yang bersangkutan. Lewat paguyubanlah masyarakat dapat mengenal aneka budaya dari berbagai daerah.

Cukup banyak manfaat dengan keberadaan paguyuban-paguyuban. Tentu, tujuan utama paguyuban-paguyuban itu untuk kepentingan para anggota-anggotanya. Dengan menjadi anggota, yang bersangkutan banyak memperoleh manfaat menambah erat pergaulan sesama anggota. Paguyuban dapat pula sebagai sarana informasi baik untuk kemajuan paguyuban itu sendiri ataupun kepentingan menyangkut kehidupan para anggotanya. Misalnya dalam musibah, para anggota dapat membantu baik materi ataupun nonmateri kepada yang bersangkutan. Selain anggota juga masalah penghidupan, misal ada salah seorang anggota yang masih menganggur, maka anggota yang lain bisa mencarikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya.

Tidak sedikit paguyuban yang masih peduli pada lingkungannya, seperti PHDI. Paguyuban ini cukup tanggap akan situasi dewasa ini. Negara ini sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. PHDI turun tangan dengan

membagikan sembako kepada yang membutuhkannya. Dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pihak PHDI pernah mengadakan semacam diklat yang membina pemuda untuk menyiapkan masa depannya.

Keberadaan paguyuban telah banyak manfaatnya baik bagi para anggotanya maupun masyarakat sekitar. Namun demikian, iklim yang harmonis dalam kehidupan antar paguyuban, antara paguyuban dengan masyarakat, dan antara paguyuban dengan Pemda setempat perlu dijaga. Semua pihak perlu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Kemajemukan suku bangsa kemudian terwadahi dalam sejumlah paguyuban telah mewarnai kehidupan sosial budaya masyarakat Semarang. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak selalu berjalan mulus. Adakalanya ada riak-riak kecil muncul di permukaan walaupun tidak menjadi gelombang pasang yang bisa mengusik ketentraman. Dalam kemajemukan tentu terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain. Adanya perbedaan berpotensi untuk terjadinya konflik pertentangan. Apalagi bila tak ada yang dominan di antara kelompok suku bangsa atau paguyuban, maka pertentangan antar satu dengan lainnya mudah terjadi.

Di Kota Semarang terdapat budaya dominan yakni budaya Jawa. Sebagaimana yang telah disebut di bagian atas, Kota Semarang berada di provinsi Jawa Tengah sekaligus berada di wilayah tempat budaya (Jawa) itu hidup dan berkembang. Dengan demikian, budaya Jawa merupakan budaya dominasi di Semarang. Secara alamiah budaya-budaya yang tidak dominan cenderung membaaur pada budaya dominan. Dalam hal kasus Semarang ini budaya dominan adalah Jawa.

Paling tidak budaya dominan (Jawa) dapat mengeliminir pertentangan atau konflik dalam hubungan antar budaya yang dalam hal ini diperankan oleh paguyuban-paguyuban itu. Bagaimanapun juga, konflik itu akan selalu ada. Jangankan antar agama, antar suku bangsa, antar kelompok, atau antarpaguyuban, konflik bisa terjadi di mana dan kapan saja.

Konflik kemungkinan terjadi apa di dalam keluarga, antar tetangga dan seterusnya dalam lingkup yang lebih luas. Jadi, yang kita cari dan inginkan bagaimana mendapatkan titik temu di antara perbedaan-perbedaan, “Kita inginkan bagaimana mencari jalan kemesraan. Mari kita lebih mengandalkan persaudaraan yang orisinal, yang otentik”, kata Emha Ainun Najib pada Sarasehan “Umat Beragama Membangun Persaudaraan Sejati yang Terbuka” pada Minggu, 28 Februari 1999.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Budhisantoso, Prof. Dr. S.

- 1997 **Pembangunan Nasional Indonesia dengan Berbagai Persoalan Budaya dalam Masyarakat Majemuk** (Makalah), Disampaikan pada Temu Pakar Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjenbud. Depdikbud. di PKBI Jakarta.

Daldjoeni, N., Drs

- 1978 **Seluk beluk masyarakat kota (Pusparagam Sosiologi Kota)**, alumni, Bandung

Beriya, Wayan dkk.

- 1984 **Upacara Tradisional Daerah Bali**. Proyek IDKD, Depdikbud. Jakarta

Herlianto. M.Th., Ir.

- 1997 **Urbanisasi, Pembangunan, dan Kerusakan Kota PT Alumni**, Bandung

Kalangi, Nico. S,

- 1979 **"Masalah Komunikasi Antarbudaya" dalam Komunikasi Antardaerah Suku Bangsa dan Pembauran**. Depdikbud, Ditjenbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN. Jakarta

Kasmadi Hartono, Wiyono

- 1985 **Sejarah Sosial Kota Semarang**, Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud. Jakarta

Marbun, BN, SH,

- 1979 **Kota Masa Depan: Prospek dan Masalahnya**. Erlangga, Jakarta

P3KD Depdikbud

- 1985 **Adat Istiadat Daerah Bali**. Pengembangan Media Kebudayaan. Jakarta

Soekanto, Soerjono

1970      **Sasiologi Suatu Pengantar.** Universitas Indonesia. Jakarta

Suprapti, MC., Dra.

Lingkungan Budaya (**booklet**). Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini. Ditjarahnitra, Ditjenbud, Depdikbud. Jakarta

Swarsi, Si Luk dkk.

1986      **Kedudukan dan Peranan Wanita Pedesaan Daerah Bali.** Proyek IDKD. Jakarta

### Daftar Informan

1. Nama : Drs. Anak Agung Ketut Darmaja  
Umur : 43 tahun.  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Bintal Rohani Hindu A.D.  
Alamat : Asrama Brigif Banyumanik Semarang.
2. Nama : I Dewa Nyoman Suratna SH.  
Umur : 46 tahun.  
Pendidikan : Sarjana Hukum  
Pekerjaan : Bappeda Tk II  
Alamat : Semarang Barat
3. Nama : Dewa Ayu Putri  
Umur : 40 tahun  
Pendidikan : Sarjana muda  
Pekerjaan : Pegawai Kanwil Depdikbud Semarang  
Alamat : Tlogosari, Semarang.
4. Nama : Sri Rahayu  
Umur : 46 tahun  
Pendidikan : IKIP  
Pekerjaan : Guru SMK/SM Pek.Sos  
Alamat : Semarang Barat
5. Nama : Ny. Ketut Darmaja  
Umur : 34 tahun  
Pendidikan : PGAH Denpasar  
Pekerjaan : Guru SD  
Alamat : Asrama Brigif Banyumanik
6. Nama : Parmanto SH  
Umur : 52 tahun  
Pendidikan : Sarjana Hukum  
Pekerjaan : Karyawan Kanwil Depdikbud Semarang  
Alamat : Semarang

7. Nama : I Putu Indra Widayana  
Umur : 23 tahun  
Pendidikan : Mahasiswa Arsitektur  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jalan Kumudas Moro 28 Semarang
8. Nama : Made Dewi Martha Handayani  
Umur : 20 tahun  
Pendidikan : Mahasiswa.  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jalan Perdana , Banyumanik Semarang.
9. Nama : Nengah Surpen Nurmala AMD  
Umur : 51 tahun  
Pendidikan : D III Manajemen Univ. Semarang.  
Pekerjaan : Karyawan PT. Nindya Karya  
Alamat : Jalan Lantai Tengah, Semarang
10. Nama : Candana Wangi Tandil  
Umur : 36 tahun  
Pendidikan : Sarjana Muda  
Pekerjaan : Karyawati Kanwil Depdikbud Jawa Tengah.  
Alamat : Semarang

Perpustakaan  
Jenderal

305